#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA KERJA
RENJA
DINAS KESEHATAN
Kabupaten Purwakarta TAHUN 2025

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

2024

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);

36. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
37. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu :

a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada RPD dan RKPD;
c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Bayu Asih;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
11. Dinas Pangan dan Pertanian;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
22. Dinas Perikanan dan Peternakan;
23. Sekretariat Daerah;
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Inspektorat;
30. Kecamatan Jatiluhur;
31. Kecamatan Sukasari;
32. Kecamatan Maniis;
33. Kecamatan Tegalwaru;
34. Kecamatan Plered;
35. Kecamatan Sukatani;
36. Kecamatan Darangdan;
37. Kecamatan Bojong;
38. Kecamatan Wanayasa;
39. Kecamatan Kiarapedes;
40. Kecamatan Pasawahan;
41. Kecamatan Pondoksalam;
42. Kecamatan Purwakarta;
43. Kecamatan Babakan Cikao;

44. Kecamatan Campaka;
45. Kecamatan Cibatu;
46. Kecamatan Bungursari;
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 6

Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPD Kabupaten Purwakarta

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 30 Juli 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN
Jalan Veteran Nomor 60 Purwakarta 41115
Telepon (0264) 206586 Faks. 211747 e_mail : dinkes@purwakartakab.go.id
Website : purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 050.1/ 224 - Dinkes/ VII/2024

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 204);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

22. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 –

2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

26. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 231);

27. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

28. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 2024)

Memperhatikan : Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 30)

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

KEDUA : Renja Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

KETIGA Renja Dinas Kesehatan sebagaimana diatas berfungsi sebagai :

a. Pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penetapan arah kebijakan Program dan Anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
b. Pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun APBD Kabupaten di lingkungan Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Setiap Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja Dinas Kesehatan untuk membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kerja masing-masing program dan kegiatan.

KELIMA : Laporan kinerja sebagaimana butir KEEMPAT menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh bidang, secretariat, program maupun UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : di Purwakarta

Pada tanggal : 23 Juli 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

dr. H. Deni Darmawan, MARS
Pembina Tingkat I
NIP 197509132006041008

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN
Jalan Veteran nomor 60 Purwakarta
(0264) 200218, 206531 Faksimile (0264) 211747
PURWAKARTA
KodePos 41115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 050.1 / 427 - DINKES/ XII/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada bagian ketujuh Tatacara Penyusunan Renja Perangkat Daerah paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah pasal 125 ayat a menyatakan tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Tim PenyusunRencana Kerja Dinas Kesehatan

Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
16 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 30).
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU	:	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2025.
KEDUA	:	Menetapkan nama – nama pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan meliputi : a. Mengumpulkan data dan informasi; b. Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata caranya; c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan; d. Menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025.
KEEMPAT	:	Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan : di Purwakarta

Pada tanggal : 04 Desember 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

dr. H. Deni Darmawan, MARS
NIP 197509132006041008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR 050.1 / 427 - DINKES /XII/2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Kesehatan
Penanggung Jawab Harian	:	Sekretaris Dinas Kesehatan
Tim Pengarah	:	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Tim Teknis		Para Tim Kerja dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Kesehatan
Tim Penyusun		
Ketua	:	Johari, SKM, MKM/ Perencana Ahli Muda Tim Kerja Program dan Informasi Dinas Kesehatan
Sekretaris	:	Yeyet Nurbaeti, SKM
Anggota	:	1. Nurul Kamilah, A.Md 2. Iceu Kurniawati, SKM 3. Reni Puji Lestari, SKM 4. Veri Purnama, ST 5. Tegi Syaripudin, AMD

Purwakarta, 04 Desember 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

dr. H. Deni Darmawan, MARS
NIP 197509132006041008

Jadwal Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Uraian	Jadwal	Pelaksana/ Penanggung Jawab	Ket
A	Persiapan	Desember 2023-Januari 2024		
	1. Pemberitahuan persiapan pengumpulan Data	Desember 2023	Sub Bag PI	
	2. Pembentukan Tim Penyusun Renja 2024	Desember 2023	Kadis	
	3. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan Tahun sebelumnya	Januari-Februari 2024	Tim Penyusun	
	4. Rapat persiapan Penyusunan dan pengumpulan data	Januari 2024	Tim Penyusun	
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja 2025	Januari-Maret 2024		
	1. Penyusunan Ranwal RKPD 2025	Januari 2024	Tim Penyusun/ Kadis	
	2. Pengumpulan dan penginputan program, kegiatan dan subkegiatan Renja PD tahun 2025 di SIPD	Januari - Februari 2024(sesuai jadwal Bappelitbangda)	Tim Penyusun/ Kadis	
	3. Fasilitasi Musrenbang Desa/ Kel.	Des 2023-Januari 2024(sesuai jadwal Bappelitbangda)	Puskesmas/ Kadis dan Kapus masing2 wilayah	Penyebaran surat informasi ke puskesmas

No	Uraian	Jadwal	Pelaksana/ Penanggung Jawab	Ket
	4. Pemantauan usulan Hibah/Bansos	Januari - Februari 2024(sesuai jadwal Bappelitbangda)	Tim Penyusun/ Kadis	
	5. Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	Januari - Februari 2024(sesuai jadwal Bappelitbangda	Puskesmas/ Kadis dan Kapus masing2 wilayah	
	6. Fasilitasi Forum Konsultasi Publik	Februari 2024(sesuai jadwal Bappelitbangda	Kadis	
	7. Mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2023	Februari 2024(sesuai jadwal Bappelitbangda	Kadis	
	8. Penyempurnaan Ranwal Renja PD	Maret 2024		
C	**Rancangan Renja Dinkes 2025**	Maret M3 – M4 2024		
	1. Penyusunan Rancangan RKPD 2023	Maret 2024	Tim Penyusun	
	2. Musrenbang RKPD 2023	Maret 2024	Kadis	
D	**Perumusan Ranhir RKPD 2025**	Juli 2024		
	1. Perumusan Ranhir RKPD 2023	April- Juni 2024		

No	Uraian	Jadwal	Pelaksana/ Penanggung Jawab	Ket
	2. Penyusunan Pra RKA subkegiatan Dinkes	Mei Minggu ke 1 – 2(sesuai jadwal Bappelitbangda)		
	3. Review Ranhir Renja Dinkes 2023 oleh Bappelitangda	Juli 2024 Minggu ke 1 – 3(sesuai jadwal Bappelitbangda		
	4. Review Ranhir oleh Inspektorat			

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) tahun 2024 merupakan amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, Renja Dinas Kesehatan merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yaitu **"Meningkatkan derajat kesehatan masyakarat".**

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) ini diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai serta bahan pengambilan kebijakan agar menghasilkan keluaran yang diharapkan berupa peningkatan kinerja dan capaian program.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2024 ini tentu bukan suatu yang sempurna tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran keinginan yang dicapai pada waktu yang akan datang. Adanya keterbatasan anggaran Kabupaten Purwakarta turut mempengaruhi penentuan prioritas dan arah kegiatan sehingga sulit untuk menyusun rencana kerja yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian program yang diharapkan. Hal ini menuntut perlunya advokasi, koordinasi dan sinergitas dalam penanganan masalah kesehatan sebagai urusan wajib pemerintahan.

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Renja ini, lebih banyak berasal dari APBD Kabupaten meskipun pada APBD Kabupaten terdapat sumber anggaran lain yang masuk melalui mekanisme APBD Kabupaten seperti Bantuan Keuangan APBD Propinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus dan Dana APBN.

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Renja ini, lebih banyak berasal dari APBD Kabupaten meskipun pada APBD Kabupaten terdapat sumber anggaran lain

yang masuk melalui mekanisme APBD Kabupaten seperti Bantuan Keuangan APBD Propinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus dan Dana APBN.

Sumber pembiayaan di luar APBD Kabupaten sesungguhnya tidak dapat dipertukarkan dengan APBD Kabupaten atau menggantikan peran APBD Kabupaten. Hal ini disebabkan sumber-sumber pembiayaan tersebut tidak bisa diharapkan menjadi sumber pembiayaan tetap, tidak bisa dipastikan kelangsungannya, tidak dapat diprediksi besaran, peruntukan, dan mekanisme pencairannya. Seringkali menu dan bentuk kegiatannya sudah ditentukan dan belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan di tingkat Kabupaten. Hal ini disebabkan sumber pembiayaan lain merupakan kebijakan yang bersifat global dan nasional sesuai tujuan yang diharapkan dalam melaksanakan kebijakan bersifat internasional, nasional, maupun regional.

Dalam melaksanakan Renja Dinas Kesehatan tahun 2025 perlu keterlibatan semua pihak. Peran dan kerjasama dengan lintas program maupun lintas sektor termasuk stakcholder sangat penting. Hal ini mengingat masalah kesehatan disadari menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Untuk itu, saran perbaikan dan masukan akan berguna untuk kesempurnaan penyusunan Renja Dinas Kesehatan sangat kami harapkan untuk mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Purwakarta, 23 Juli 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

dr. H. Deni Darmawan, MARS
Pembina Tingkat I
NIP 197509132006041008

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 050.1/224 -DINKES/VII/2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I I-1 I-1

I-1 Latar Belakang I-1

I-6 Landasan Hukum I-6

I-11 Maksud dan Tujuan I-11

I-12 Sistematika Penulisan I-12

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan II-15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan II-30

2.4 Telaahan Usulan terhadap Rancangan Awal RKPD II-51

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan III-7

3.3 Program dan Kegiatan III-10

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN IV-1

BAB V PENUTUP V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan penting dala m pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan mendukung percepatan pembangunan nasional.

Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), menyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan Rancangan Awal Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
6. Verifikasi Rancangan akhir Renja perangkat daerah

Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun ke-2 perencanaan pembangunan Kabupaten Purwakarta yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dokumen Renja perangkat

daerah pada pasal 143 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi “Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah’’.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2025 memuat usulan dari hasil Musrenbang ditingkat kabupaten/Kota dengan memperhatikan Sistem Kesehatan Nasional dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja mengacu pada kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Keterkaitan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan adalah seperti ditunjukan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan

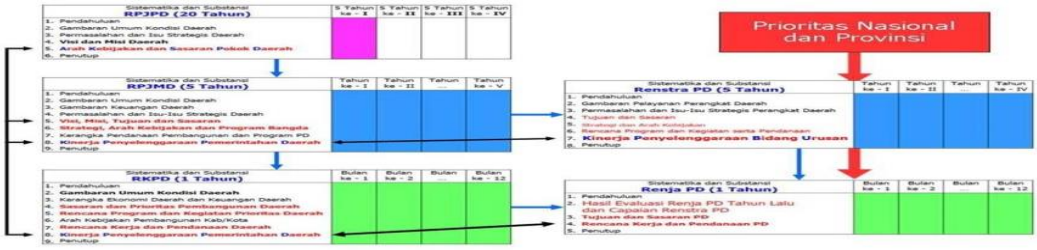

Tindak lanjut dokumen Renja PD hingga menjadi APBD adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

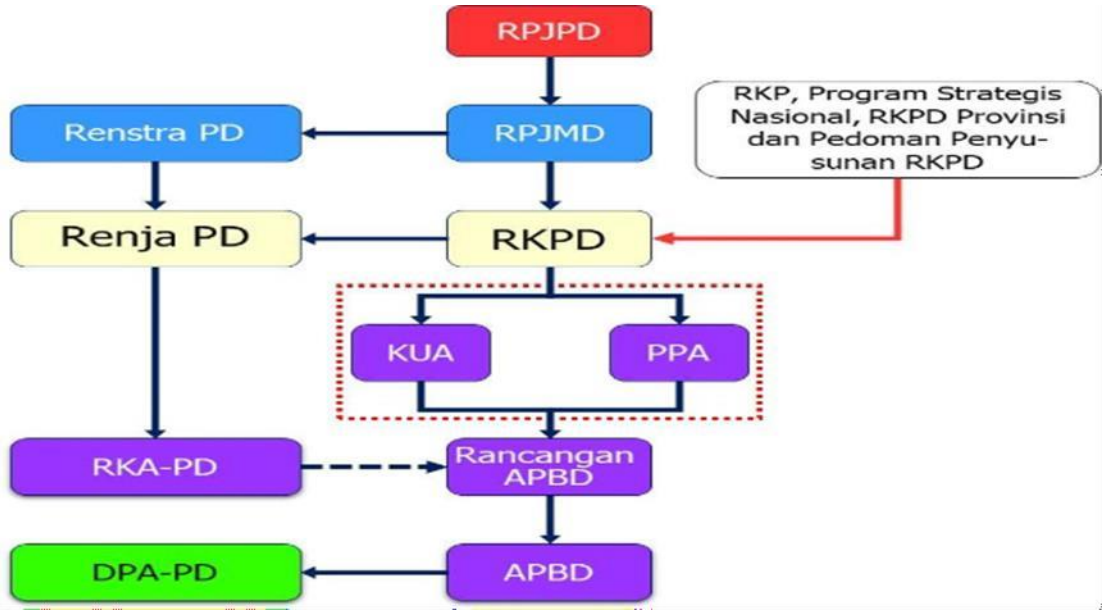

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka Dinas Kesehatan Kaqbupaten Purwakarta menetapkan arah kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi Kabupaten Purwakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026 yaitu "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH" dimana Tema Pembangunan Daerah untuk Tahun 2025 yaitu "**PENGUATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL**".

Adapun Program Prioritas Pembangunan untuk tahun 2025 yakni :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM

5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sedangkan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2025 diprioritaskan pada :

1. Peningkatan Kualitas SDM
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
6. Peningkatan Infrastruktur Daerah
7. Reformasi Birokrasi
8. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Berdasarkan rancangan awal pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2025 maka kesehatan tidak tersurat atau disebutkan pada tema, tetapi pada program prioritas maupun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 disebutkan yaitu Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana, dan merupakan prioritas utama untuk

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Purwakarta pada RKPD tahun 2025 maupun RPD tahun 2025-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
19. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 204);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human ImmunoDeficieny Virus/Acquired Immune Deficieny Syndrome dan Tuberculosis (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026;
36. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
37. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
38. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 30);

39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 92)

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan kebijakan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan dan pelaku pembangunan bidang kesehatan dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan Tahun 2025 sesuai tugas dan fungsinya.
3. Untuk memantau perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purwakarta sesuai tahapan dalam Renstra Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Purwakarta.
4. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun kedepan bersifat indikatif Kabupaten Purwakarta dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian musrenbang
5. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKA/DPA Tahun 2025
6. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan

Berdasarkan pertimbangan di atas, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 bertujuan :

1. Menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk 1 (satu) tahun kedepan.
2. Mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.
3. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar kebijakan kesehatan daerah dan pemerintah pusat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Purwakarta yang efektif, efisiensi, berkeadilan serta berkelanjutan.
5. Menciptakan sinergitas program dan kegiatan inter dan antar bidang di Dinas Kesehatan dan Lintas Sektoral.
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Renstra 2024-2026 dan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025.
7. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan pembangunan jangka pendek dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL VALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan tahun lalu, analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat

daerah, hasil review terhadap Rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan progran dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN , SASARAN, PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu program pembangunan daerah sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rumusan Kerja dan rencana Pendanaan, yaitu program pembangunan daerah dan program perangkat daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun 2023 menjadi salah satu indikator dalam penyusunan Renja Tahun 2025. Hasil kajian evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen jangka menengah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasikan sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan dihadapi

Sesuai dengan hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Kabupaten Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan Perkiraan Capaiannya di Tahun 2024, adalah seperti yang ditunjukan pada Tabel 2.1(Tabel T-C.29-Permendagri No 86 Tahun 2017) di bawah ini :

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29-Permendagri No 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Kabupaten Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	A	BB	BB	100	A	A	A
1.02.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.01.1.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
1.02.01.1.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.01.1.08	Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.01.1.10	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	60,00	36,36	36,36	36,36	100	36,36	109	27,27
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	100	100	100	100	100	300	75,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00	97,56	97,79	97,79	100	98,08	293	73,36
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	98,82	99,10	99,10	100	99,37	297	74,32
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00	71,47	71,49	71,49	100	71,49	214	53,61
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	39,94	40,72	40,72	100	40,72	121	30,34
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00	81,50	83,04	83,04	100	83,04	248	61,89
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00	65,73	66,70	66,70	100	66,70	199	49,78
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,00	59,94	64,26	64,26	100	64,26	188	47,11
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	93,58	94,42	94,42	100	94,42	282	70,60
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	79,31	86,78	86,78	100	86,78	253	63,22
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	98,00	97,81	98,08	98,08	100	98,08	294	73,49
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,00	70	78	78	100	78	225	56,37

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	100	100	100	100	100	300	75,00
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	97,56	97,79	97,79	100	97,79	293	73,28
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	98,82	98,82	98,82	100	98,82	296	74,11
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	71,47	71,49	71,49	100	71,49	214	53,61
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	39,94	40,72	40,72	100	40,72	121	30,34
		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	59,94	64,26	64,26	100	64,26	188	47,11
		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	93,58	94,42	94,42	100	94,42	282	70,60
		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	79,31	86,78	86,78	100	86,78	253	63,22
		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	97,81	98,08	98,08	100	98,08	294	73,49
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100,00	70	78	78	100	78	225	56,37
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	98,00	239	429	429	100	260	928	232

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90,00	50	40	40	100	20	110	27,5
		Rasio posyandu per satuan balita	17,60	12	12	12	100	12	37	9,34
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	98	98	98	100	98	293	73,36
	-	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100,00	97,6	97,8	97,8	100	98,0	293	73,34
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	80,2	78	78	100	78	235	58,85
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100	100	100	100	100	300	75
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	100,00	85	81	81	100	81	247	61,85
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100,00	0	20	20	100	20	40	10
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	80,00	50	37	37	100	37	125	31,25
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	95,00	92	82	82	100	82	257	64,22
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	208,52	247	283	283	100	283	813	203
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	2,26	6	3	3	100	3	12	2,97

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	95,00	92	82	82	100	82	257	64,22
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90,00	94	87	87	100	87	267	66,70
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100	100	100	100	100	300	75
		Penderita diare yang ditangani	90,00	57	57	57	100	57	170	42,44
		Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	100,00	50	75	75	100	100	225	56,25
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	90,00	20	30	30	100	50	100	25
		Cakupan kunjungan bayi	100,00	105,7	100	100	100	100	306	76,42
		Cakupan puskesmas	100,00	118	118	118	100	118	353	88,24
		Cakupan pelayanan nifas	100,00	105,0	100	100	100	100	305	76,25
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100,00	75,5	75,7	75,7	100	75,9	227	56,79
		Cakupan pelayanan anak balita	100,00	70,7	70,9	70,9	100	71,1	213	53,18
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100,00	100	100	100	100	100	300	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
1.02.02.2.01.	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.02.2.04	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	30	50	85	85	100	85	220	55

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
		Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	30	68	75	75	100	75	219	54,73
		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	30	68	74	74	100	74	215	53,8
		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	30	68	74	74	100	74	215	53,8
		Rasio dokter per satuan penduduk	30	0	0	0	100	0	0	0,05
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	30	0	0	0	100	0	0	0,07
1.02.03.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.03.2.02	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.03.2.03	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	100	100	100	100	100	100	300	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
1.02.04	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	300	75
		Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	82,00	71	80	80	100	80	230	57,52
1.02.04.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.04.2.02	Kegiatan : Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100	100	100	100	100	100	300	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
1.02.04.2.03	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.04.2.04	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.04.2.05	Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100	100	100	100	100	100	300	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
1.02.04.2.06	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan	Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat diKepala Bidang kesehatan	8	2	4	4	100	4	10	2,5
		Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	96	83	77	77	100	77	238	59,45
		Jumlah penerapan kebijakan Germas	4	4	4	4	100	4	12	3
		Persentase posyandu aktif	85	35	75	75	100	80	190	47,5
		Jumlah pedoman/regulasi/rekomend asi kebijakan penerapan Germas	15	6	9	9	100	12	27	6,75
		Persentase melaksanakan pembinaan posyandu aktif	50	20	30	30	100	40	90	22,5
1.02.05.2.01	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	300	75

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (Tahun Lalu (n-2))			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(6+7+9))	(11=(10/4))
1.02.05.2.02	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	300	75
1.02.05.2.03	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	300	75

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 1 (satu) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dimana target pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar dimana capaiannya sebesar 90%, hal ini menunjukan tidak mencapai target yang ditentukan sebesar 100%.
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 2 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan capaian masing-masing indikator yaitu Rerata capaian SPM bidang kesehatan Esensial Esensial kesehatan sebesar 106,25% dan Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial sebesar 105,26 dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator cakupan strata Posyandu Purnama Dan Mandiri sebesar 110,65%
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target adanya kebijakan seleksi ASN untuk P3K dari jalur non ASN yang tidak diikuti dengan rekrutmen ASN dari jalur umum untuk mengisi tenaga kesehatan yang lulus di tempat lain sementara rekrutmen NON ASN sudah tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk target yang terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan disebabkan adanya ketersediaan yang droping/hibah dari pusat atau provinsi serta target program yang masih dibawah 100% atau adanya penduduk di luar wilayah kabupaten Purwakarta yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purwakarta;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan capaian tersebut maka perlu adanya revisi capaian yang terlah disusun dalam Renstra apakah targetnya terlalu tinggi sehingga tidak mencapai target atau targetnya terlalu rendah sehingga melebihi 100%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian termasuk juga dalam updating data, dan pemisahan data

antara penduduk Purwakarta dan di luar Purwakarta, serta analisis yang mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target atau melampaui target tersebut.

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain dengan melakukan pendataan sasaran secara akurat, melakukan pemetaan kantong-kantong/ wilayah yang yang rawan yang berpotensi/penyebab wilayah tersebut tidak mencapai target/wilayah dengan capaian rendah, sehingga dengan dipetakan dapat dilakukan intervensi/pendekatan secara khusus sehingga wilayah/kantong tersebut dapat ditangani sehingga pada tahun berikutnya dapat meningkat dan mencapai target yang telah ditentukan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Rencana Kerja tahun 2025 mengalami perubahan, menyesuaikan dengan adanya perubahan kebijakan terkait dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026, sehingga Renstra dan Renja Dinas Kesehatan juga mengalami perubahan termasuk indikator capaian pada Renja 2024 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. Hal ini berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 tertanggal 30 Maret 2023, maka terdapat perubahan yang sangat signifikan dari 7 (tujuh) indikator pada Renstra 2018-2023 menjadi 90 (sembilan puluh) indikator atau 78 (tujuh puluh delapan) hasil penggabungan (SPM dan LPPD)

pada Renstra 2024-2026 dan Renja 2024. Dimana indikator pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula 2 (dua) indikator menjadi 75 (tujuh puluh lima) indikator. Dan terdapat kesamaan indikator yaitu 12 indikator pada LPPD merupakan indikator SPM Bidang Kesehatan sehingga bila digabungkan/ disederhanakan menjadi 63 indikator. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dari 1 (satu) indikator menjadi 6 (enam) indikator. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dari 1 (satu) indikator menjadi 2 (dua) indikator. Program Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan dari 1 (satu) indikator menjadi 6 (enam) indikator, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari 2 (dua) indikator menjadi 1 (satu) indikator.

Hal ini Hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11 (Tabel T-C.30-Permendagri No 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
1	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	LPPD	IKK	36,36	45,45	54,55	63,64	36,36	45,45	54,55	63,64	
2	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	SPM/LPPD	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	SPM/LPPD	IKK	98,08	98,37	98,67	98,96	98,08	98,37	98,67	98,96	
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	SPM/LPPD	IKK	99,37	99,65	99,93	100,00	99,37	99,65	99,93	100,00	
5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	SPM/LPPD	IKK	71,49	72,77	74,05	75,32	71,49	72,77	74,05	75,32	
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM/LPPD	IKK	40,72	41,50	42,28	43,06	40,72	41,50	42,28	43,06	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM/LPPD	IKK	83,04	84,58	86,12	87,66	83,04	84,58	86,12	87,66	
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	SPM/LPPD	IKK	66,70	67,67	68,64	69,61	66,70	67,67	68,64	69,61	
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM/LPPD	IKK	64,26	68,57	72,89	77,21	64,26	68,57	72,89	77,21	
10	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM/LPPD	IKK	94,42	95,25	96,09	96,92	94,42	95,25	96,09	96,92	
11	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	SPM/LPPD	IKK	86,78	94,25	97,24	99,48	86,78	94,25	97,24	99,48	
12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	SPM/LPPD	IKK	98,08	98,58	99,09	100,00	98,08	98,58	99,09	100,00	
13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	SPM/LPPD	IKK	78	86	96	100	78	86	96	100	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	97,79	98,37	98,67	98,96	98,08	98,37	98,67	98,96	
16	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	98,82	99,10	99,38	99,38	99,37	99,10	99,38	99,38	
17	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	71,49	72,77	74,05	75,32	71,49	72,77	74,05	75,32	
18	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	40,72	41,50	42,28	43,06	40,72	41,50	42,28	43,06	
19	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	64,26	68,57	72,89	77,21	83,04	68,57	72,89	77,21	
20	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	94,42	95,25	96,09	96,92	66,70	95,25	96,09	96,92	
21	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	86,78	94,25	97,24	99,48	64,26	94,25	97,24	99,48	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	98,08	98,58	99,09	100,00	94,42	98,58	99,09	100,00	
23	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	78	86	96	100	86,78	86	96	100	
24	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	260	125	95	85	98,08	125	95	85	
25	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	SPM/LPPD	IKK	20	12	9	8	78	12	9	8	
26	Rasio posyandu per satuan balita	Permendagri 86/2017	IKK	12	12	12	12	12	12	12	12	
27	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Permendagri 86/2017	IKK	98	98	98	98	98	98	98	98	
28	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga	Permendagri 86/2017	IKK	98,0	98,2	98,4	98,6	98,0	98,2	98,4	98,6	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan											
29	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Permendagri 86/2017	IKK	78	100	100	100	78	100	100	100	
30	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Permendagri 86/2017	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
31	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Permendagri 86/2017	IKK	81	100	100	100	81	100	100	100	
32	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Permendagri 86/2017	IKK	20	100	100	100	20	100	100	100	
33	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Permendagri 86/2017	IKK	37	70	80	90	37	70	80	90	
34	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Permendagri 86/2017	IKK	82	90	95	100	82	90	95	100	
35	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Permendagri 86/2017	IKK	283	246	209	171	283	246	209	171	
36	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Permendagri 86/2017	IKK	3	3	2	2	3	3	2	2	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
37	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Permendagri 86/2017	IKK	82	90	95	100	82	90	95	100	
38	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Permendagri 86/2017	IKK	87	90	90	95	87	90	90	95	
39	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Permendagri 86/2017	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
40	Penderita diare yang ditangani	Permendagri 86/2017	IKK	57	85	90	100	57	85	90	100	
41	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Permendagri 86/2017	IKK	4;4	4;4	4;4	4;4	4;4	4;4	4;4	4;4	
42	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Permendagri 86/2017	IKK	50	70	80	100	50	70	80	100	
43	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Permendagri 86/2017	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
44	Cakupan puskesmas	Permendagri 86/2017	IKK	118	118	118	118	118	118	118	118	
45	Cakupan pelayanan nifas	Permendagri 86/2017	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
46	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Permendagri 86/2017	IKK	75,9	76,1	76,3	76,5	75,9	76,1	76,3	76,5	
47	Cakupan pelayanan anak balita	Permendagri 86/2017	IKK	71,1	71,3	71,5	71,7	71,1	71,3	71,5	71,7	
48	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Permendagri 86/2017	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
B	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan											
1	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	RPD/Renstra	IKK	85	30	30	40	85	30	30	40	
2	Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	RPD/Renstra	IKK	75	30	30	40	75	30	30	40	
3	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	RPD/Renstra	IKK	74	30	30	40	74	30	30	40	
4	Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	RPD/Renstra	IKK	74	30	30	40	74	30	30	40	
5	Rasio dokter per satuan penduduk	RPD/Renstra	IKK	0	30	30	40	0	30	30	40	
6	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	RPD/Renstra	IKK	0	30	30	40	0	30	30	40	
C	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman											

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	RPD/Renstra	IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	RPD/Renstra	IKK	79.67	80	82	85	79.67	80	82	85	
D	Program : Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan											
1	Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat diKepala Bidang kesehatan	RPD/Renstra	IKK	4	6	8	10	4	6	8	10	
2	Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	RPD/Renstra	IKK	77	89	96	100	77	89	96	100	
E	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	RPD/Renstra	IKK	BB	A	A	A	BB	A	A	A	

2.2.2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

Tabel 2.12
Hasil Evaluasi Akuntabilitias Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2023

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Tahun								
				2021			2022			2023		
				Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian
A.	Tujuan											
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Index	70.98	71,18	100	70,68	71,47	100,71	71,24	71,24	100
B.	Sasaran utama											
1	Meningkatnya aksebilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase kematian ibu	%	0.12	0,27	45	0.11	0,148	74,32	0,09	0,139	64,75
		Persentase kematian bayi	%	0.46	0,41	111	0.44	0,433	101,62	0.41	0,686	59,77
C.	Sasaran Program :											
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	BB	A	110	BB	A	100	BB	BB	100
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	75	60	80	80	80	100	85	87	102,35

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	Tahun								
				2021			2022			2023		
				Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Persentase Tingkat Capaian
2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	%	75	75	100	75	83,43	111,24	80	85	106,25
		Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	90	91,74	102	95	100	105,26	95	100	105,26
2.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar (minimal 9 jenis tenaga kesehatan)	%	90	50	56	95	98,41	103,59	100	90	90
2.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	92,21	99	107	94,81	100	105,48	100	100	100
2.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	63,3	68	108	63,89	68,09	106,58	65.16	72	110,65

Dari 10 indikator yang diukur, sebanyak 7 indikator (100%) mencapai atau melebihi target, sedangkan 3 indikator yang tidak mencapai target yaitu 2 indikator sasaran dan 1 indikator program. Penyebab indikator sasaran tidak mencapai target yaitu persentase kematian ibu dan bayi belum mencapai target, hal ini disebabkan meskipun jumlah kasus kematian ibu sama dengan tahun lalu tetapi adanya kenaikan target dan meningkatnya jumlah kelahiran hidup, serta belum terkendalinya 3 T (tiga terlambat) dalam penanganan kegawatdaruratan pelayanan kesehatan ibu dan bayi yaituterlambat dalam pengambilan keputusan tingkat rujukansehingga kondisi kesehatan ibu dan bayi dalam stadium harus segera ditangani, terlambat dalam rujukan seperti transportasi pasien ke rumah sakit, baik dari rumah pasien, maupun antar klinik, rumah sakit/bidan desa ke rumah sakit serta penanganan di rumah sakit. Penyebab lainnya yaitu sangat kompleksnya penanganan kasus kematian ibu dan bayi. Selain itu berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran dan perilaku masyarakat, anggaran yang belum memadai, serta data pelaporan yang belum optimal.

Sedangkan 1 indikator program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator Pemenuhan tenaga kesehatan minimal 9 jenis tenaga sesuai standar hanya mencapai 90%. Hal ini disebabkan tidak adanya kebijakan pengangkatan baru untuk THL sedangkan rekrutment P3K hanya untuk alih tenaga dari non ASN menjadi ASN.

Selain itu masalah kematian ibu dan bayi merupakan masalah yang kompleks bukan hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan semata namun berkaitan juga dengan sosial ekonomi masyarakat, sehingga perlu dukungan lintas sektor dan stakeholeder termasuk keluarga, pasangan dan masyarakat sekitarnya.

Penyebab lainnya antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang atau melaporkan ke sarana pelayanan kesehatan, serta kurangnya keterampilan SDM kesehatan dalam melakukan pemeriksaan maupun melaksanakan

sweeping/pelacakan dan penyisiran sasaran di masyarakat ataupun di sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti klinik, rumah sakit, dan sarana UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat) lainnya.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk mencari penyebab masalah dominan serta intervensi yang efektif. Karena kasus kematian ibu dan bayi ini masih cenderung fluktuatif, sehingga belum ada penurunan kasus yang signifikan.

2.2.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

Program dan kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam Komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*). Sedangkan berdasarkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2.13
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

NO	URAIAN	Layanan SPM			Capaian SPM (80%)	Mutu (20%)	Capaian IP-SPM	Kategori Indeks Pencapaian SPM
		Sasaran	Realisasi	%				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.766	17.474	98,36	78,69	19,75	98,44	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.959	16.609	97,94	78,35	19,79	98,14	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16.151	16.151	100,00	80,00	20,00	100,00	

NO	URAIAN	Layanan SPM			Capaian SPM (80%)	Mutu (20%)	Capaian IP-SPM	Kategori Indeks Pencapaian SPM
		Sasaran	Realisasi	%				
4	Pelayanan Kesehatan Balita	78.020	71.157	91,20	72,96	18,42	91,38	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	143.607	143.607	100,00	80,00	20,00	100,00	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	621.023	504.008	81,16	64,93	20,00	84,93	
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	108.372	82.841	76,44	59,22	18,43	79,58	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	70.532	67.812	96,14	76,91	19,81	96,72	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	13.202	13.202	100,00	80,00	20,00	100,00	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.352	1.352	100,00	80,00	20,00	100,00	
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	22.799	20.906	91,70	73,36	20,00	93,36	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	23.675	21.541	90,99	72,79	19,28	92,07	
	Cakupan SPM			93,5	74,8	19,6	94,55	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2023 terhadap standar IKU maupun SPM, maka dapat dikatakan tingkat kinerja Dinas Kesehatan saat ini masih terdapat capaian yang dibawah target yang diharapkan. Hal ini terutama terlihat dari capaian indikator kinerja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sedangkan secara detailnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan program yang paling gemuk karena mencakup semua bidang dan sekretariat. Hal ini disebabkan jangkauan program kesehatan yang paling luas, terkait pelayanan kesehatan secara keseluruhan dari mulai pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan sumber daya kesehatan, pelayanan dan pengawasan fasilitas kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan. Hal ini tercermin cukup banyaknya indikator pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat termasuk jumlah sub kegiatan pada program tersebut. Selain itu permasalahan lainnya yaitu masih belum meratanya Sumber Daya Manusia Kesehatan baik kuantitas dan kualitas, terbatasnya anggaran kesehatan serta masih kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat serta dukungan lintas sektor serta stakeholder.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Kesehatan

a. Permasalahan

- Distribusi dan ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan strategis yang belum memenuhi standar serta retensi SDM yang rendah.
- Terdapat ketidakselarasan prioritas pembangunan kesehatan antara pusat, provinsi dan daerah terutama terkait pembagian kewenangan dan janji pemerintah daerah (Bupati/Gubernur)

- Sumber dan besaran anggaran yang tidak dapat diprediksi kepastian dan ketepatan waktunya, sehingga menyulitkan pengalokasian belanja kegiatan.
- Penyelenggaraan penganggaran pembangunan kesehatan yang masih berorientasi budget (*budget-based performance*) bukan bukan budget berorientasi kinerja *(performance-based budgeting)*, menyebabkan pembiayaan tidak didasarkan pada analisis anggaran kesehatan kabupaten (*District Health Account)* yang tersebar dibeberapa perangkat daerah.
- Kesehatan merupakan proyek investasi yang outcome maupun impactnya baru dapat dilihat dalam kurun waktu yang lama karena indikator yang digunakan untuk bidang kesehatan tidak bersifat fisik/kebendaan atau riil serta sangat multifaktor, contohnya perilaku dan derajat kesehatan.
- Belum dibentuknya atau belum efektifnya sistem kesehatan daerah.
- Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi ditandai dengan masih sulitnya memperoleh data yang akurat dan tepat waktu.
- Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur karena terbatasnya sumber daya pendukungnya menyebabkan tidak optimalnya kualitas pelayanan kesehatan baik tingkat dasar maupun di tingkat rujukan.
- Belum optimalnya promosi kesehatan, hal ini antara lain terlihat dari masih belum baiknya perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan.
- Masih tingginya kasus Kematian Bayi dan Ibu Melahirkan, masalah Gizi seperti stunting, penyakit menular dan tidak menular serta penyakit berbasis kesehatan lingkungan termasuk cakupan air bersih dan sanitasi dasar/ jamban sehat di masyarakat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- Masih belum terlindunginya seluruh masyarakat (*Universal Health Coverage*) Jaminan Kesehatan di Kabupaten Purwakarta.

b. Hambatan

- Kemiskinan yang merupakan determinan sosial dari derajat kesehatan masyarakat belum ditangani secara komprehensif.
- Kontribusi daerah dalam pembiayaan kesehatan masih belum memenuhi kebutuhan minimal pelayanan kesehatan. Meskipun prosentase anggaran kesehatan kabupaten sudah mendekati 10% dari total APBD Kabupaten, namun lebih banyak disumbang non APBD Kabupaten, serta belum adanya analisis yang komprehensif tentang pemanfaatan anggaran tersebut untuk peningkatan capaian pelayanan kesehatan tersebut.
- Pencapaian target universal coverage JKN belum didukung dengan penyediaan databased masyarakat miskin diluar kuota PBI serta belum terintegrasinya data masyarakat miskin tersebut.
- Otonomi daerah termasuk dibidang kesehatan sangat tergantung pada *political will* Pimpinan Daerah dan PAD. Dukungan pemerintah pusat hanya sebagai stimulan sedangkan hak asasi kesehatan masyarakat merupakan *public good* yang merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi.
- Tingginya peran politisi dalam pengambilan kebijakan menyebabkan perencanaan yang tidak obyektif dan evidence based.
- Masih kurangnya peran dan fungsi masyarakat khususnya kader, tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat karena pendekatan peran serta yang dilaksanakan selama ini bersifat mobilisasi sehingga kegiatan tidak berkesinambungan.
- Dampak negatif dari globalisasi sehingga memberikan peluang masuknya tenaga kesehatan dan perusahaan jasa pelayanan kesehatan asing ke Indonesia dan kemungkinan bergesernya paradigma pelayanan kesehatan dari *public good* menjadi *market share*.
- Dampak negatif *climate change* dan *Global warming* karena pesatnya perkembangan industri terhadap perubahan kondisi lingkungan memungkinkan munculnya ancaman berbagai penyakit.

- Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi Lintas program dan Lintas Sektor dalam perencanaan, pembinaan dan pengawasan kesehatan yang sinergis, baik untuk kegiatan, sasaran, lokasi, waktu, maupun anggaran sehingga upaya penyelesaian masalah kesehatan yang multi dimensi cenderung tidak tuntas.

2.3.2 Dampak Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan SKPD terhadap pencapaian visi & misi kepala daerah dan terhadap pencapaian program nasional(SPM)/internasional (SDGs)

Kesehatan merupakan satu dari tiga *basic core* Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Purwakarta disamping pendidikan dan ekonomi. Oleh karenanya dalam mencapai visi pembangunannya Kepala Daerah menetapkan bidang kesehatan dalam Misi II RPJD 2015-2025. Hambatan dan permasalahan kesehatan dalam bidang sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan, jaminan kesehatan serta kondisi lingkungan yang berpengaruh pada akses dan mutu pelayanan kesehatan tersebut akan berdampak pada lambatnya pencapaian misi II RPJD serta program nasional yang diukur dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan percepatan pencapaian program internasional (SDGs).

Kinerja Dinas kesehatan ini secara tidak langsung menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dalam Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Purwakarta. Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan serta kewenangan pengelolaan keuangan menyebabkan puskesmas tidak fleksibel dalam pemenuhan kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan. Sedangkan Ketidaktersediaan sumber daya yang memenuhi standar baik sarana prasarana maupun SDM maupun standar pelayanan yang kurang optimal memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Terlebih lagi dengan rendahnya cakupan jaminan kesehatan menyebabkan masyarakat berfikir sekian kali untuk mengakses pelayana kesehatan karena harus mengeluarkan biaya secara langsung *(out of pocket).* Terhadap semua dampak tersebut, Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang sangat krusial. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai

pentingnya memelihara PHBS dan terlibat secara aktif dalam pembangunan kesehatan merupakan peran kunci dalam terwujud atau tidaknya peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Dalam menyelenggarakan fungsinya Dinas Kesehatan tak lepas dari berbagai tantangan dari lingkungan eksternal yang perlu dijawab dan direspon serta peluang yang dapat diraih untuk meningkatkan dan mempercepat tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

a. Tantangan

- Laju pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan meningkatnya kepadatan pemukiman
- Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sementara kemampuan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan masih terbatas dan tingginya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat sehingga sering menimbulkan "konflik" dalam pelayanan kesehatan.
- Munculnya masalah penyakit baru *(new emerging desease)*, penyakit lama yang muncul kembali *(reemerging desease)* dan pergeseran penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif sementara kasus penyakit infeksi masih tinggi *(double borden).*
- Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional termasuk capaian dan mempertahankan UHC (*Universal Health Coverage*) menuntut kesiapan sektor kesehatan dan sektor pendukungnya baik dari segi infrastruktur, SDM maupun manajemen.
- Kecenderungan meningkatnya kasus *non infectious disease* (penyakit tidak menular) berdampak pada meningkatnya pembiayaan kesehatan dan diperlukanannya peningkatan PHBS dan perbaikan gaya hidup sehat
- Meningkatnya dana operasional puskesmas dari berbagai sumber termasuk kapitasi BPJS Kesehatan dan meningkatnya beban dalam pelayanan

pengobatan di tingkat primer menyebabkan pergeseran fungsi puskesmas lebih ke arah kuratif dibandingkan preventif, sehingga membutuhkan pelayanan pengelolaan keuangan yang akutabel dan memperkuat Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang kuat, independen dan transparan. Hal ini mendorong diperlukannya perubahan manajemen puskesmas yang lebih professional

- Modernisasi mendorong budaya hidup masyarakat yang cenderung memiliki l*ifestyle* yang negatif dan individualis merupakan tantangan besar untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sehingga menjadi l*ifestyle* sehat dan peduli terhadap sesama dan lingkungannya

b. Peluang

- Telah adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan kesehatan didaerah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan kesehatan.
- Diterbitkannya berbagai regulasi terkait kesehatan seperti Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyediakan acuan dan standar yang kuat bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dan jaminan kesehatan semesta/ UHC(*Universal Health Coverage*) di Kabupaten Purwakarta.
- Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2005-20025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026.

- Budaya masyarakat yang mendukung kegiatan pembangunan kesehatan dimana masyarakat cukup terbuka dalam menerima perubahan dan perbaikan hidup dalam bidang kesehatan.
- Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ditandai dengan meningkatnya angka melek huruf dan lama waktu sekolah diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan
- Adanya anggaran pembangunan kesehatan dari berbagai sumber pembiayaan seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi (Bantuan Gubernur), Dana alokasi khusus serta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari Pemerintah untuk orang miskin dan rencana pengembangan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat serta anggaran operasional puskesmas dari berbagai sumber (BOK, Kapitasi BPJS).
- Rekrutment pegawai negeri sipil baik untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan melalui formasi khusus bagi tenaga kesehatan yang statusnya PTT, THL maupun formasi umum yang telah mulai dilaksanakan di daerah.
- Meningkatnya jumlah peranan pelayanan kesehatan swasta maupun pengobatan tradisional, sumber daya pendukung termasuk tenaga dan anggaran.
- Berkembangnya institusi pendidikan yang merupakan asset mitra pembangunan kesehatan.
- Meningkatnya kepercayaan penanam modal di Kabupaten Purwakarta berdampak peningkatan PAD yang memungkinkan meningkatnya pembiayaan pembangunan sector kesehatan
- Kebijakan Kemenkes dan Provinsi Jawa Barat yang mendorong Akreditasi serta PPK-BLUD untuk Failitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik

2.3.4 Isu Kebijakan di Berbagai Level

Dalam rangka menjaga keselarasan dan sinergitas kebijakan dan program kesehatan serta pelaksanaanya di daerah maka berbagai isu penting terkait kesehatan yang berkembang dari berbagai jenjang pemerintahan perlu dipahami dan dijabarkan hingga tingkat daerah. Berikut adalah dinamika perkembangan isu kesehatan yang terjadi akhir akhir ini.

Tabel 2.13

IDENTIFIKASI DINAMIKA ISU-ISU PENTING BIDANG KESEHATAN DARI BERBAGAI LEVEL			
Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Regional (Jawa Barat)**	**Lokal (Kabupaten Purwakarta)**
Tujuan Pembangunan Dunia /*Susteinable Development Goals* (SDGs): 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan 2. Menurunkan angka kematian anak 3. Meningkatkan kesehatan ibu 4. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 5. Memastikan kelestarian lingkungan hidup (termasuk ketersediaan air bersih)	Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN : 1. Meningkatkan status kesehatan rakyat Indonesia di setiap tahap kehidupan (dari bayi sampai Lansia) 2.Meningkatkan status gizi masyarakat 3. Peningkatan ProgramJaminan Kesehatan Nasional yang lebih optimal 4.Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak menular 5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan	Tujuan Inti Pembangunan Jawa Barat (*Common Goals*) dalam RPD Provinsi Jawa Barat : 1. Peningkatan Kualitas layanan Kesehatan 2 Peningkatan aksesibilitas layanan Kesehatan	Melanjutkan Program RPJMD Tahap Ke-3, Dengan Tekanan Pada: 1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat 2. Jaminan Kesehatan Masyarakat 3. Pembangunan Puskesmas DTP di daerah sulit akses pelayanan rawat inap 4. Penanggulangan gizi buruk / Bank Gizi 5. Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, pencegahan penyakit dan perbaikan lingkungan

Dengan terlebih dahulu menggali dan mengindentifikasi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan di Kabupaten Purwakarta diatas dan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan isu global, nasional, regional dan local sesuai dinamika yang berkembang saat ini yang cenderung belum beranjak dari isu tahun sebelumnya, maka isu strategis yang ditetapkan tersebut adalah :

1. **Akses pelayanan kesehatan rawat inap rendah belum merata sehingga utilitasnya belum optimal.**

   Belum terjangkaunya akses pelayanan kesehatan rawat inap di daerah yang jauh dari perkotaan. Peta sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan fasilitas rawat inap saat ini masih terkonsentrasi di perkotaan berupa rumah sakit, maupun klinik. Sedangkan pembangunan puskesmas perawatan untuk mendekatkan akses perawatan saat ini baru ada 4 unit yang berlokasi di kecamatan diluar perkotaan dan 1 di wilayah pusat kota. Untuk menghadapi tantangan program Jaminan Kesehatan nasional dimana setiap warga Negara diharuskan terlindung oleh sistem jaminan kesehatan, sehingga diprediksi pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk rawat inap akan semakin meningkat maka perlu pengembangan fungsi puskesmas menjadi puskesmas dengan perawatan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau. Hal ini juga perlu diikuti dengan upaya promosi dan diseminasi informasi yang lebih baik sehingga akan meningkatkan utilitas layanan rawat inap di puskesmas. Khusus untuk Puskesmas DTP Purwakarta, pertimbangan pembangunannya lebih upayakan untuk membagi peran rujukan kasus sederhana sehingga mengurangi beban perawatan di RSUD.

2. **Mutu dan akses pelayanan kesehatan masih rendah**

   Peningkatan fungsi puskesmas menjadi puskesmas dengan perawatan tidak diiringi dengan kesiapan manajemen puskesmas dan sumber daya yang lain seperti SDM kesehatan, alat-alat kesehatan yang spesifik, Standar Operasional Prosedur (SOP). SDM kesehatan untuk beberapa kategori seperti dokter, dokter gigi, apoteker, ahli gizi, analis, sanitarian, kesehatan masyarakat dan perawat belum mencukupi baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan tenaga bidan sudah terpenuhi kuantitasnya namun masih perlu ditingkatkan kualitas

dan pemerataan distribusinya. Beberapa tenaga kesehatan masyarakat masih banyak terdistribusi di Dinas Kesehatan dibandingan di puskesmas. Disamping tenaga teknis bidang kesehatan, tenaga non kesehatan juga tak dapat diabaikan perannya dalam turut mendukung kelancaran pelayanan kesehatan, terutama tenaga akutansi dan informatika yang tidak tersedia di puskesmas sehingga harus memanfaatkan dan membebankan tugasnya kepada tenaga fungsional kesehatan yang seharusnya dapat lebih fokus terhadap pencapaian output SPM dibidangnya, terutama di level puskesmas. Hambatan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar yang berlaku akan menghambat pemenuhan tuntutan pelayanan yang berkualitas. Diantara sarana prasarana tersebut adalah desain dan ruangan puskesmas, sistem penaggulangan kebakaran dan kebisingan, kelistrikan dan lainnya yang belum terpenuhi di seluruh puskesmas. Upaya pemenuhan standar tersebut perlu segera dilaksanakan guna menunjang pelayanan yang bermutu.

3. **Menurunnya daya dukung lingkungan dan permasalahan sanitasi**

   Semakin padatnya pemukiman, rendahnya kualitas air, dan udara akibat industri serta dampak dari pemanasan global berkontribusi terhadap menurunnya daya dukung lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu determinan yang mempengaruhi status kesehatan manusia sebesar 50% (teori H L Blum). Kondisi lingkungan yang buruk dan tidak diiringi dengan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat akan meningkatkan peluang meningkatnya penyakit menular disebabkan lingkungan (*water borne disease, air borne disease* maupun *zoonosis*).

4. **Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan dan Dukungan Pemerintah daerah dalam Program JKN Belum Optimal**

   Sumber pembiayaan kesehatan Kabupaten Purwakarta berasal dari APBN (DAK Fisik dan Non Fisik termasuk BOK untuk puskesmas),

Bantuan Gubernur dari provinsi, APBD kabupaten maupun NGO namun masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran Dinas Kesehatan, sedangkan distribusi anggaran kesehatan di OPD lain tidak dapat diketahui dan belum terkoordinasikan dengan baik. Disamping itu, kebijakan pimpinan pemerintah daerah yang dominan dalam menentukan arah pembangunan kesehatan dan penganggaran mempengaruhi tingkat objektifitas perencanaan sehingga perencanaan yang *evidence-based* kurang optimal yang berakibat pada tidak tercapainya SPM terhadap cost yang sudah digulirkan.

Salah satu kebijakan pembiayaan kesehatan, digunakan untuk mendanai masyarakat yang kesulitam dalam pembiayaan kesehatan melalui jaminan kesehatan PBPU/BP Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pemanfaatan Jaminan kesehatan yang tersedia baik dari Jaminan kesehatan PBPU/BP Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jaminan kesehatan dari Provinsi Jawa Barat maupun JKN APBN yang merupakan subsidi relatif tinggi. Disisi lain program JKN mendorong masyarakat baik sektor formal maupun informal untuk memiliki jaminan kesehatan memberikan konsekuensi tuntutan mutu pelayanan yang lebih baik. Hal in akan menimbulkan *multiplier effect* terhadap kesiapan berbagai sarana pelayanan kesehatan baik dari segi SDM, sarana prasarana maupun manajemen. Dalam hal ini pemerintah selain perlu memikirkan penyediaan jaminan bagi masyarakat kurang mampu diluar JKN KIS juga harus memenuhi standar pelayanan yang bermutu. Dengan sistem pelayanan kesehatan maskin non kuota Jamkesmas yang hanya mensyaratkan SKTM, maka pemanfaatan dana akan sulit dikontrol, karena sistem data yang terbuka memungkinkan setiap orang dapat mengakses SKTM. Dengan demikian membuka peluang kecurangan yang berakhir pada pemborosan anggaran.

5. Pemberdayaan, peran serta masyarakat, pihak swasta dan Stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan belum optimal

Untuk mendorong masyarakat hidup sehat secara mandiri, kesadaran dan keterlibatan secara aktif dari masyarakat merupakan salah satu modal utama dalam suatu pembangunan kesehatan, manusia merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan. Dimulai dari pribadi, keluarga, kelompok/organisasi dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang terjadi saat ini masih pada taraf mobilisasi dan instruksi dari pemimpin wilayah dengan menetapkan regulasi. Program Desa Siaga belum dapat beroperasional secara aktif dan konsisten menjalankan forum desa siaga dengan programnya, sehingga masih perlu distimulus dengan penggerakan SMD dan MMD dari puskesmas. Disamping itu adanya kebijakan ambulan desa dimana segala bentuk operasionalnya ditanggung oleh Pemda, pada satu sisi sangat membantu masyarakat dapat mendekatkan akses pelayanan kesehatan terutama dalam hal rujukan pasien namun disisi lain menyebabkan kemandirian masyarakat sulit dirangsang dan justru meningkatkan ketergantungan kepada pihak pemerintah. Keberadaan berbagai industri dan institusi suasta yang diharapkan dapat menyokong pembangunan di wilayahnya melalui CSR belum dapat dilibatkan secara optimal. Hal ini masih terlihat dari kegiatan yang seharusnya dapat dialokasikan dari UKBM seperti pembangunan, operasional dan PMT posyandu dan Lansia, masih selalu muncul melalui musrenbang untuk diusulkan ke Pemda melalui Dinas kesehatan. Optimalisasi kerjasama jejaring puskesmas (RS/RB/Klinik/Apotek/praktek swasta) dan stakeholder kesehatan lainnya juga perlu ditingkatkan untuk dapat bersinergi menyelesaikan masalah kesehatan secara komprehensif.

6. **Masih terjadinya permasalahan kesehatan seperti kasus kematian ibu, bayi dan kasus gizi stunting serta angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular dan sanitasi lingkungan**

Capaian kinerja yang belum mencapai target dan rendahnya derajat kesehatan yang ditandai masih tingginya kasus kematian ibu, bayi dan stunting merupakan manifestasi dari buruknya mutu pelayanan kesehatan.

Potret kesehatan saat ini sangat terkait dengan pengalokasian anggaran yang tidak efektif dan diperburuk dengan pemahaman indikator kinerja dari pengelola program yang tidak dimaknai sebagai raport penilaian kinerja terhadap program yang sudah dilaksanakan dan didanai selama tahun berjalan, sehingga terjadi kecenderungan untuk menetapkan jenis-jenis kegiatan yang monoton dan kurang tajam dari tahun ketahun tanpa memperhatikan dasar permasalahan yang dihadapi sebagai strategi mencapai indicator kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Hal menyebabkan penyerapan anggaran kesehatan belum dapat memberikan korelasi yang positif terhadap pencapaian target kinerja yang ditetapkan

Terhadap isu – isu penting maka ditetapkan formulasi kebijakan berupa rekomendasi sebagai solusi dan tindak lanjut melalui program dan prioritas kegiatan Dinas Kesehatan. Kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

1). Peningkatan akses pelayanan rawat inap melalui Peningkatan fungsi puskesmas menjadi DTP secara bertahap

Pembangunan puskesmas rawat inap seluruh kecamatan merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, mengurangi beban pelayanan pada tingkat rujukan (rumah sakit), meningkatkan

fungsi dan kualitas puskesmas. Sehingga dapat mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi semua masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah karena membutuhkan biaya sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, sarana bangunan, sarana dan alat kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keefektifan pelayanan itu sendiri. Untuk itu, pembangunan puskesmas rawat inap dilakukan secara bertahap dan mengklasifikasikan puskesmas ke depan menjadi puskesmas dengan unit gawat darurat (Puskesmas UGD), puskesmas rawat inap dengan pelayanan persalinan kegawatdaruratan dasar/pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (Puskesmas PONED) dan puskesmas dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP).

2). Peningkatan kualitas layanan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan dengan pemenuhan sumber daya dan penguatan regulasi dan SOP kesehatan

Upaya pemenuhan kebutuhan obat-obatan, peralatan kesehatan, sarana prasarana yang memadai serta sumber daya kesehatan yang cukup secara kualitas dan kuantitas dan pembiayaan kesehatan ditujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam upaya mendorong peningkatan fungsi puskesmas maka dinas kesehatan terus menorong peningkatan anggaran kesehatan untuk operasional pelayanan kesehatan masyarakarat di puskesmas. Tahun 2021 diharapkan anggaran operasional puskesmas yang berasal dari berbagai sumber dapat dikelola lebih efektif dan efisien dengan peningkatan SDM yang handal. Upaya perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan ini juga dibarengi dengan penguatan perangkat regulasi dan standar operasional prosedur untuk menjamin pelayanan yang berkualitas serta mengutamakan pada fungsi penyelenggaraan upaya kesehatan

Masyarakat melalui upaya promotif, preventif dan rehabilitatif tanpa mengesampingkan upaya pelayanan kesehatan perorangan.

3). Pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi UKBM termasuk Desa Siaga dan swasta melalui *public private partnership*

Perubahan perilaku merupakan pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, konsistensi, dan teladan yang nyata di lapangan serta pemeliharaan sikap. Perubahan perilaku kearah kemandirian hidup sehat atau PHBS bukan saja didorong berasal dari kesadaran masyarakat melalui pendidikan kesehatan maupun promosi kesehatan namun perlu didukung oleh faktor lingkungan yang memungkinkan *(enabling factor)* dan penekanan melalui regulasi *(reinforcing factor)* sehingga dengan sendirinya akan dirasakn manfaatnya dan menjadi gaya hidup yang positif. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada tokoh kunci di masyarakat, pihak swasta dan stake holder kesehatan lainnya.

Salah satu wadah pemberdayaan masyarakat yang efektif mensukseskan penyelenggaraan program kesehatan adalah Desa Siaga Sehat yang merupakan sinergitas dari berbagai program kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hingga ketingkat desa/kelurahan dan penjabaran dari kabupaten sehat.

4). Penguatan fungsi, manajemen serta pengelolaan keuangan puskesmas

Puskesmas merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan pemerintah dan unit pelaksana teknis dinas kesehatan dalam menjalankan fungsinya tidak terbatas pada pelayanan kesehatan strata pertama (pengobatan/kuratif) tetapi harus menjalankan dua fungsi lainnya yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat mendorong perubahan paradigma mayarakat terhadap pelayanan kesehatan

dari *paradigma sakit* menjadi *paradigma sehat***.** Sehingga pelayanan kesehatan dapat bergeser dari *pelayanan kuratif menjadi* pelayanan *promotif* dan *preventif* dengan tetap tidak meninggalkan pelayanan *kuratif*. Namun perkembangan kebijakan pemerintah daerah dan pusat mengenai jaminan kesehatan telah menempatkan porsi kuratif pada puskesmas semakin meningkat proporsinya. Hal ini perlu disiasati dengan pembenahan manajemen puskesmas, memilah bidang urusan pelayanan kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif dan bidang pelayanan kesehatan perorangan dalam bentuk preventif dan kuratif rehabilitatif. Maka untuk mengantisipasi dampak dari meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat serta meningkatnya anggaran dan pembiayaan jaminan kesehatan. Hal ini didukung pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 78 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dimana pelayanan kesehatan merupakan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum yang diutamakan menjadi BLUD. Maka sejak tanggal 1 Januari 2022 semua Puskesmas telah ditetapkan menerapkan BLUD. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 440/Kep.726-Dinkes/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 Desember 2021.

5). Mendukung dan mempersiapkan pencapaian *universal coverage* atau Jaminan kesehatan Nasional semesta

Kesehatan merupakan hak dasar dan investasi bagi setiap warga negara. Namun meningkatnya biaya pelayanan kesehatan serta tidak dapat diprediksi seseorang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan serta tidak dapat diprediksi kebutuhan biaya pelayanan ketika sakit menyebabkan masyarakat harus selalu menyediakan

biaya kesehatan setiap saat. Namun dalam kenyataannya masyarakat tidak selalu menyediakan uang yang cukup ketika sakit dengan biaya yang besar. Masyarakat masih cenderung membayar pelayanan kesehatan secara cash *(fee for service).* Dengan demikian jaminan kesehatan dapat meningkatkan fungsi proteksi terhadap keuangan keluarga.

Pemerintah pusat menjamin biaya kesehatan penduduk miskin dengan Jamkesmas yang telah dileburkan ke dalam JKN bersama dengan peserta jaminan kesehatan dari Askes dan Jamsostek serta peserta yang berasal dari asuransi kesehatan lainnya pada tahun 2014. Pemerintah daerah kabupaten Purwakarta menjamin masyarakatnya yang diluar quota jamkesmas dengan program Jampi dimana ke depan akan dilakukan integrasi secara bertahap ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Permasalahan yang muncul adalah belum tervalidasinya datanya data sasaran program Jampi menjadi peserta JKN BPJS karena belum tersedianya data base kepesertaan masyarakat miskin diluar quota secara *by name by address.*

6). Peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan dengan memperhatikan siklus hidup.

Peningkatan derajat kesahatan memperhatikan determinan yang mepengaruhinya berupa lingkungan, perilaku, akses pelayanan kesehatan dan faktor keturunan serta determinan sosial. Hal ini bertujuan menurunkan kasus kematian ibu, bayi, balita, meningkatkan status gizi, terbebas dari penyakit menular dan dan tidak menular serta menciptakan lingkungan yang sehat. Upaya kesehatan pada tiap siklus kehidupan memerlukan perlakuan yang berbeda mulai dari bayi dalam kandungan, neonatal, bayi, balita, remaja, dewasa serta usia lanjut. Dengan demikian pendekatan

intervensi yang dilakukan dan pelayanan yang diberikan juga lebih spesifik memandang kebutuhan segi fisiologi sasaran.

Mencermati uraian diatas maka isu kesehatan, kebijakan, strategi, Program dan kegiatan prioritas dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.14

ISU-ISU PENTING, REKOMENDASI KEBIJAKAN, STRATEGI PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

ISU – ISU PENTING	REKOMENDASI KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS
Akses pelayanan kesehatan rawat inap rendah belum merata sehingga utilitasnya belum optimal.	Peningkatan akses pelayanan rawat inap melalui Peningkatan fungsi puskesmas menjadi DTP secara bertahap	Meningkatkan fungsi puskesmas menjadi DTP secara bertahap Pemenuhan sumber daya untuk pelayanan Puskesmas DTP	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengadaan Meubelair dan alkes Puskesmas Rawat Inap Penyediaan Tenaga ASN dan NON ASN/Pegawai BLUD
Mutu dan akses pelayanan kesehatan masih rendah	Peningkatan kualitas layanan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan dengan pemenuhan sumber daya dan penguatan regulasi dan SOP kesehatan	Peningkatan ketersediaan sumber daya dan sarana di 20 puskesmas	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Perbaikan dan Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu), poskesdes dan rumah dinas Kendaraan Roda 2 bagi puskesmas (20 unit) Pengadaan kendaraan operasional pelayanan kesehatan pendukung Desa Siaga Sertifikasi Puskesmas dan Jaringannya dalam rangka implementasi Permenkes 43/2019 Pengadaan sarana penunjang Puskesmas (Genset, APAR, instalasi telepon)
		Pencapaian standarisasi pelayanan kesehatan primer	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi & Registrasi sarana dan tenaga kesehatan Akreditasi Puskesmas Persiapan akreditasi Labkesda
		Mencukupi ketersediaan dan menjamin kualitas dan keamanan obat,	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Buffer Stock Obat Kabupaten Purwakarta Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan

ISU – ISU PENTING	REKOMENDASI KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS
		reagensia dan bahan habis pakai	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	konsumen/ Masyarakat di bidang obat, pangan dan bahan berbahaya Kegiatan Pengadaan Reagensia dan alat laboratorium Kesehatan dan penunjang akreditasi Kalibrasi Alat Labkes
	Penguatan fungsi manajemen serta pengelolaan keuangan puskesmas	Memetakan kembali ketenagaan dan menganalisis beban kerja tenaga kesehatan di puskesmas	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelatihan Manajemen Puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes No.75/2014
Masih terjadinya permasalahan kesehatan seperti kasus kematian ibu, bayi dan kasus gizi buruk/ stunting serta angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular dan sanitasi lingkungan	Peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan dengan memperhatikan daur hidup.	Meningkatkan pelayanan kesehatan wajib dan pengembangan baik didalam dan diluar gedung dengan menekankan pada upaya promotif dan preventif	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penunjang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Penunjang Administrasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
		Peningkatan Manajemen pelayanan KIA, melalui : - Meningkatkan kapasitas tenaga KIA - Meningkatkan fungsi PONED dan Pemenuhan sarana KIA - Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai KIA	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia KIA Peningkatan Manajemen Pelayanan KIA KB Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir
		Peningkatan manajemen penanggulangan masalah gizi masyarakat, melalui : Penanganan kelompok rawan melalui pemberian intervensi	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pencegahan dan Penanggulangan bayi dan balita gizi buruk, gizi kurang serta bumil KEK Penanggulangan gizi buruk melalui Pemberian Makanan Tambahan

ISU – ISU PENTING	REKOMENDASI KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS
		gizi (suplementasi), seperti kapsul Vitamin A, MP-ASI dan makanan tambahan , penanggulangan gizi buruk dan intervensi gizi kurang dan gizi lebih		Kewaspadaan Gizi bayi dan balita Penanggulangan Gangguan Gizi akibat kekurangan Iodium (GAKI) Pencegahana dan penanggulangan Anemia pada Remaja Putri di Sekolah
		Peningkatkan manajemen penanggulangan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, melalui penguatan surveillance penyakit dan PD3I	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Imunisasi Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi jemaah haji Penanggulangan bencana dibidang kesehatan Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit TBC dan HIV-AIDS Penanggulangan penyakit Filariasis RVS penyakit kusta di desa endemis dan OJT kusta bagi dokter Puskesmas Pengadaan Kendaraan Ambulance TB MDR
		Revitalisasi kemitraan di berbagai sektor	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Lansia Pembinaan Pel. Kes Pengembangan
				Pelayanan P3K (Festival Budaya dalam rangka Hari Jadi Kab. Purwakarta) dan Kesiagaan Hari Raya dan Tahun Baru Pengelolaan perencanaan Sumber daya kesehatan dan penyusunan Rencana kerja Dinas Kesehatan Pengelolaan data informasi dan profil kesehatan

ISU – ISU PENTING	REKOMENDASI KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS
				Survey dan analisa data kesehatan Pengadaan sarana pendukung sistem informasi kesehatan Pemantauan, evaluasi dan penilaian capaian kinerja program dan kegiatan serta penyusunan lap. tahun Penyusunan Profil Puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes No.75/2014 Penyusunan Data based Standar sarana prasarana puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes No.75/2014 Pengelolaan Persiapan Implementasi Permenkes No.75/2014 Pengelolaan Perijinan puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes no.75/2014
Menurunnya daya dukung lingkungan dan permasalahan sanitasi	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan Perlindungan masy. terhadap dampak negatif industri	Pengawasan kualitas lingkungan, inspeksi sarana sanitasi seperti air bersih, rumah pemukiman sehat, jamban sehat dan sarana pembuangan air limbah	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Penyehatan Lingkungan Pemukiman - Penyehatan Sanitasi (TPM), (TU-I) Pengawasan Kualitas Air
				Pengadaan dan Pembangunan IPAL puskesms (APBN & BanGub) Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dn Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes 75/2014
Pemberdayaan, peran serta masyarakat, pihak swasta dan Stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan belum optimal	Pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi UKBM termasuk Desa Siaga dan swasta melalui *public private partnership*	Peningkatan kualitas dan sarana promosi kesehatan Peningkatan kemitraan dengan sektor terkait kesehatan Penguatan partisipasi dan kerjasama lembaga swadaya	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program : Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan	Pembinaan PHBS Rumah Tangga Pengadaan sarana Promosi Kesehatan untuk penyuluhan Revitalisasi Desa Siaga Pelatihan Jabatan Fungsional penyuluh kesehatan masyarakat

ISU – ISU PENTING	REKOMENDASI KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS
		masyarakat dan sector swasta Mengaktifkan desa siaga		-
Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan dan Dukungan Pemerintah daerah dalam Program JKN Belum Optimal	Mendukung dan mempersiapkan pencapaian *universal coverage* atau Jaminan kesehatan Nasional	meningkatkan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional kepada masyarakat Mengintensifkan Persiaopan, koordinasi, pembinaa dan pengawasan terhadap penyelenggaraan JKN	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (BanGub) - Pelayanan kesehatan penduduk miskin melalui Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat Purwakarta Istimewa - Pendampingan pengelolaan jminan kesehatan nasional (JKN) - Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat Kegiatan pengelolaan dana kapitasi JKN

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun setelah mendapatkan masukan dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Purwakarta sebagai gambaran awal rencana kerja Kepala Daerah selama satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan kebijakan daerah dan permasalahan spesifik yang dihadapi. Disamping itu Rancangan awal RKPD mencakup usulan hasil kegiatan musrenbang dan rancangan awal Rencana Kerja OPD di seluruh Kabupaten Purwakarta. Terhadap RKPD ini selanjutnya perlu dilakukan telaah lebih lanjut untuk menselaraskan berbagai kepentingan dan kebutuhan pembangunan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan dn mengakomodir amanat kebijakan kesehatan baik dari tingkat nasional atau Kementerian Kesehatan maupun kebijakan Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga perlu dilakukan untuk mengatur strategi pengalokasian dana yang tersedia dari berbagai sumber baik APBN, Bantuan Gubernur, maupun APBD Kabupaten dengan memperhatikan strategi untuk mendapatkan *protective benefit* dan *positive benefits* sehingga dapat terhindar dari kemungkinan tidak

teranggarkannya suatu kegiatan karena pengalokasian sumber dan waktu perencanaan yang kurang tepat. Disamping itu pula dengan mempertimbangkan kemungkinan dapat atau tidak dapat terlaksananya suatu kegiatan karena sumber daya manusia dan sarana prasarananya. Dengan demikian dapat dipilah program atau kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan, karena tidak seluruh usulan yang disampaikan merupakan kebutuhan.

Tabel 2.15 (Tabel T-C.31-Permendagri No 86 Tahun 2017)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN PURWAKARTA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	Dinas Kesehatan				207.133.828.294		Dinas Kesehatan			207.133.828.294	
1.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	106.523.567.079	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A	106.523.567.079	
1.02.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	380.000.000	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	380.000.000	

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	65.135.976.463	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	65.135.976.463	
1.02.01.1.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	305.000.000	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	305.000.000	
1.02.01.1.05	Kegiatan :Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	360.000.000	Kegiatan :Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	360.000.000	
1.02.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.195.000.000	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.195.000.000	
1.02.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.500.000.000	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.500.000.000	

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.01.1.08	Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.538.168.000	Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	3.538.168.000	
1.02.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	513.773.656	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	513.773.656	
1.02.01.1.10	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	100	33.595.648.960	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	100	33.595.648.960	
1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,15	86.109.252.055	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,15	86.109.252.055	
			Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	45,45				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	45,45		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,37				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,37		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,65				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,65		
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	72,77				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	72,77		
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41,50				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41,50		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,58				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	84,58		
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	67,67				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	67,67		
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68,57				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68,57		
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,25				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,25		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	94,25				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	94,25		
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	98,58				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	98,58		
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	86				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	86		
			Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100				Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100		
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	98,37				Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	98,37		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99,10				Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	99,10		
			Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	72,77				Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	72,77		
			Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	41,50				Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	41,50		
			Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	68,57				Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	68,57		
			Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	95,25				Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	95,25		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94,25				Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	94,25		
			Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	98,58				Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	98,58		
			Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	86				Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	86		
			Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	125				Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	125		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	12				Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	12		
			Penurunan Incidence Rate Kasus TBC (per 100.000 penduduk)	125				Penurunan Incidence Rate Kasus TBC (per 100.000 penduduk)	125		
			Penurunan Angka Kematian Kasus TBC (per 100.000 penduduk)	12				Penurunan Angka Kematian Kasus TBC (per 100.000 penduduk)	12		
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4		
			Angka kelangsungan hidup bayi	0,44				Angka kelangsungan hidup bayi	0,44		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	99,61				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	99,61		
			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	105				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	105		
			Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	105				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	105		
			Rasio posyandu per satuan balita	12				Rasio posyandu per satuan balita	12		
			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,191				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,191		
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,011				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,011		
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	98		
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,2				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,2		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100		
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100		
			Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita /hari)	tidak ada data karena tidak ada sub kegiatan survei/ penelitian untuk mengukur tersebut				Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	tidak ada data karena tidak ada sub kegiatan survei/ penelitian untuk mengukur tersebut		
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	100				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	100		
			Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100				Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	100		
			Cakupan balita pneumonia yang ditangani	70				Cakupan balita pneumonia yang ditangani	70		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita	90				Cakupan penemuan dan penanganan penderita	90		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			penyakit TBC BTA					penyakit TBC BTA			
			Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	246				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	246		
			Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3				Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3		
			Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	90				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	90		
			Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90		
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100		
			Penderita diare yang ditangani	85				Penderita diare yang ditangani	85		
			Angka kejadian Malaria	0				Angka kejadian Malaria	0		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tingkat kematian akibat malaria	0				Tingkat kematian akibat malaria	0		
			Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	100				Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	100		
			Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100				Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	100		
			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	< 0,015				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	< 0,015		
			Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	100				Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	100		
			Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	70				Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	70		
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	100				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	100		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			masyarakat miskin					masyarakat miskin			
			Cakupan kunjungan bayi	100				Cakupan kunjungan bayi	100		
			Cakupan puskesmas	118				Cakupan puskesmas	118		
			Cakupan pembantu puskesmas	26				Cakupan pembantu puskesmas	26		
			Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	100				Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	100		
			Cakupan pelayanan nifas	100				Cakupan pelayanan nifas	100		
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	76,1				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	76,1		
			Cakupan pelayanan anak balita	71,3				Cakupan pelayanan anak balita	71,3		
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100				Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100		
			Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100				Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100		
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100		
			Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0				Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0		
			Persentase desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan	91				Persentase desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan	91		
			Persentase sarana air minum yang diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	60				Persentase sarana air minum yang diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	60		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	21				Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	21		
			Persentase tempat tempat dan fasilitas umum(TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	62				Persentase tempat tempat dan fasilitas umum(TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	62		
1.02.02.2.01.	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100	15.737.118.303	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100	15.737.118.303	
1.02.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	69.962.133.752	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	69.962.133.752	

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	210.000.000	Kegiatan : Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	210.000.000	
1.02.02.2.04	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	200.000.000	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	200.000.000	
1.02.03	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	30	13.201.009.160	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	30	13.201.009.160	
			Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	30				Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	30		
			Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	30				Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar	30		
			Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	30				Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan	30		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Rasio dokter per satuan penduduk	30				Rasio dokter per satuan penduduk	30		
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk	30				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	30		
1.02.03.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	100	100.000.000	Kegiatan : Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	100	100.000.000	
1.02.03.2.02	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	100	12.901.009.160	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	100	12.901.009.160	
1.02.03.2.03	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100	200.000.000	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	100	200.000.000	

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kesehatan Tingkat Daerah					Kesehatan Tingkat Daerah			
1.02.04	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	100	620.000.000	Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	100	620.000.000	
			Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	80				Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	80		
1.02.04.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)	100	115.000.000	Kegiatan : Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)	100	115.000.000	

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.04.2.02	Kegiatan : Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100	420.000.000	Kegiatan : Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	100	420.000.000	

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.04.2.03	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100		Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.04.2.04	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	50.000.000	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	50.000.000	
1.02.04.2.05	Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100	35.000.000	Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100	35.000.000	

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.04.2.06	Kegiatan :Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100		Kegiatan :Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100		
1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan		Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat diKepala Bidang kesehatan	6	680.000.000	Program : Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan		Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat diKepala Bidang kesehatan	6	680.000.000	
			Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	89				Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	89		
			Jumlah penerapan kebijakan Germas	4				Jumlah penerapan kebijakan Germas	4		
			Persentase posyandu aktif	85				Persentase posyandu aktif	85		

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah pedoman/regulasi/rekomend asi kebijakan penerapan Germas	15				Jumlah pedoman/regulasi/rekomend asi kebijakan penerapan Germas	15		
			Persentase melaksanakan pembinaan posyandu aktif	50				Persentase melaksanakan pembinaan posyandu aktif	50		
1.02.05.2.01	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	45.000.000	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	45.000.000	
1.02.05.2.02	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	615.000.000	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	615.000.000	

Nomor	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.02.05.2.03	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	20.000.000	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	20.000.000	

Berdasarkan review terhadap rancangan awal dan analisis kebutuhan, maka belum semua kebutuhan dapat terpenuhi mengingat adanya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kegiatan. Selain itu adanya kegiatan baru yang belum masuk pada rancangan awal, disebabkan adanya prioritas dan kebijakan baru baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Hal ini juga masih kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan proses pembahasan KUA PPAS dan penetapan APBD Kabupaten Purwakarta. Disisi lain keberhasilan dari capaian kegiatan dipengaruhi juga oleh peran serta masyarakat dan lintas sektor, dimana hal tersebut diluar kendali Dinas Kesehatan. Berbagai pengaruh dan faktor lainnya mempengaruhi juga terhadap belum terpenuhinya kebutuhan minimal pelayanan kesehatan. Sedangkan kesesuaian antara rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan menunjukan adanya kesesuaian, hal ini karena telah memperhitungkan keterbatasan dan kemampuan permasalahan di atas. Namun untuk memecahkan seluruh permasalahan dan menjawab tantangan bidang kesehatan dimasa depan maka diperlukan analisis lebih lanjut dan dukungan dan advokasi yang kuat dengan stakeholder terkait.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain itu dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025 dengan memperhatikan dan mengsinergikan dengan usulan internal Dinas Kesehatan. Adapun usulan dari luar Dinas Kesehatan antara lain aspirasi masyarakat dan pokok pikiran wakil rakyat DPRD Kabupaten Purwakarta. Adapun usulan tersebut sudah diakomodir pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

USULAN	MASALAH	KECAMATAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI MITRA
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Kondisi POLINDES untuk pelayanan kesehatan masyarakat dalam keadaan Ruksak Berat	Bojong	Dinas Kesehatan	Usulan telah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat di lanjutkan dan diakomodir
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Germas phbs	Wanayasa	Dinas Kesehatan	Usulan belum sesuai dengan kamus usulan yang di tuju yaitu sosialisasi Germas/PHBS, perangkat daerah yang dituju sudah sesuai, agar diperbaiki usulan sesuai kamus
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Minim nya alkes dan pasilitas Pendukung Posyandu	Bungursari	Dinas Kesehatan	Usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat di lanjutkan
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Perlunya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang ditunjang dengan Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Bojong	Dinas Kesehatan	Usulan telah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat di lanjutkan dan diakomodir
Musrenbang : Sosialisasi Germas/PHBS	Perlu antisipasi terjadinya masalah kesehatan tarutama Stunting, TBC, dan	Bojong	Dinas Kesehatan	Usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat di lanjutkan
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Mutu Pelayanan	Plered	Dinas Kesehatan	usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat di lanjutkan
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Masih banyak permasalahan kualitas kesehatan desa	Tegalwaru	Dinas Kesehatan	Usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat diakomodir dan dilanjutkan

USULAN	MASALAH	KECAMATAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI MITRA
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kader-kader Posyandu	Campaka	Dinas Kesehatan	Usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat di lanjutkan
Musrenbang : Sosialisasi Germas/PHBS	Pembinaan Pola Hidup Sehat	Plered	Dinas Kesehatan	usulan telah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat diproses dan di lanjutkan
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Perlunya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Pasawahan	Dinas Kesehatan	Usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat di lanjutkan dan di proses
Musrenbang : Sosialisasi Germas/PHBS	Agar terciptanya gerakan masyarakat untuk Pola Hidup Bersih dan Sehat	Pasawahan	Dinas Kesehatan	usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat dilanjutkan dan diproses
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Tidak adanya Bangunan Posyandu di Kp. Cipicung	Sukatani	Dinas Kesehatan	usulan belum sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju , agar menginput kembali kamus usulan ke pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan lembaga kerjasama antar desa dengan PD tujuan DPMD
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Belum mempunyai tempat pelayanan kesehatan Posyandu yang mumpuni bagi warga masyarakat	Tegalwaru	Dinas Kesehatan	Usulan terkait bangunan posyandu di arahkan ke perangkat daerah DPMD dan kamus Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	masih minimnya sarana kesehatan masyarakat di cianting utara	Sukatani	Dinas Kesehatan	Usulan sudah sesuai dengan iamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat dilanjutkan dan diproses
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan keterampilan dan pelayanan bagi kader pos yandu	Plered	Dinas Kesehatan	usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat diakamodir dan di lanjutkan

USULAN	MASALAH	KECAMATAN	OPD TUJUAN AWAL	REKOMENDASI MITRA
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Kurangnya Alat Kesehatan untuk Posbindu "Alat Terapi Fohoway"	Sukatani	Dinas Kesehatan	usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat dilanjutkan
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Sudah tidak representatip	Bungursari	Dinas Kesehatan	usulan sudah sesuai dengan kamus usulan da perangkat daerah yang dituju, usulan dapat di proses dan di lanjutkan
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	kurangnya sarpras kesehatan sehingga menghambat pelayanan kesehatan masyarakat	Sukatani	Dinas Kesehatan	usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan dapat di lanjutkan dan diproses
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	PELAYANAN KESEHATAN BAYI / BALITA DI POSYANDU UNTUK SKRINING	Plered	Dinas Kesehatan	usulan sudah sesuai dengan kamus usulan dan perangkat daerah yang dituju, usulan sudah dapat dilanjutkan
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	bangunan klinik milik desa sudah tidak layak huni perlu perbaikan	Jatiluhur	Dinas Kesehatan	usulan kurang tepat dengan kamus usulan seharusnya lebih kepada pelayanan/program kesehatannya , kalau bangunan di desa seperti posyandu terpadu itu ke DPMD
Musrenbang : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Balita Belum Punya Bangunan Posyandu	Bojong	Dinas Kesehatan	usulan belum sesuai dengan kamus dan perangkat daerah yang dituju, agar diperbaiki dan diinput ulang ke kamus Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan tujuan perangkat daerah DPMD

%

Tabel 2.17 (Tabel T-C.32-Permendagri No 86 Tahun 2017)
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Dan Aspirasi Masyarakat
Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Nomor	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	Dinas Kesehatan				
1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	% 60,00	
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	% 100,00	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	% 100,00	
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	% 100,00	
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	% 100,00	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	% 100,00	
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	% 100,00	
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	% 100,00	
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	% 90,00	
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	% 100,00	

Nomor	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	% 100,00	
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	% 98,00	
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	% 90,00	
			Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 100,00	
			Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 100,00	
			Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 100,00	
			Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 100,00	
			Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 100,00	
			Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 100,00	
			Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 100,00	
			Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 100,00	
			Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 100,00	
			Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 100,00	
			Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	% 98,00	

Nomor	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	90,00	
			Rasio posyandu per satuan balita	%	17,60	
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100,00	
	-		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100,00	
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00	
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,00	
			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100,00	
			Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	100,00	
			Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	80,00	
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	95,00	
			Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	208,52	
			Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	2,26	
			Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	95,00	
			Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90,00	
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,00	
			Penderita diare yang ditangani	%	90,00	

Nomor	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	%	100,00	
			Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	90,00	
			Cakupan kunjungan bayi	%	100,00	
			Cakupan puskesmas	%	100,00	
			Cakupan pelayanan nifas	%	100,00	
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100,00	
			Cakupan pelayanan anak balita	%	100,00	
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100,00	
1.02.02.2.01.	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1	
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya (Pustu) yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1	
1.02.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17747	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16941	

Nomor	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	16151	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7815	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	143607	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	621532	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	108372	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	70532	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13202	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1352	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	22799	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	24512	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	1	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	

Nomor	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.02.05	Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat diKepala Bidang kesehatan	kali	6	
			Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina	%	89	
1.02.05.2.01	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	3	
1.02.05.2.02	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	5	
1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga	183000	
1.02.05.2.03	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kabupaten Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	

Dengan memperhatikan berbagai usulan yang dikumpulkan baik dari masyarakat maupun pemangku kebijakan dari berbagai stakeholder termasuk puskesmas dan UPTD lainnya serta aspirasi masyarakat melalui kunjungan lapangan, forum musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, maupun usulan Bidang teknis maka hasil-hasil tersebut menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan. Dalam penyerapan aspirasi maka Dinas Kesehatan membentuk dan menyebarkan tim pemantau untuk mengikuti jalannya musrenbang. Hasil musrenbang tersebut digunakan untuk menyusun Rancangan Renja Dinas Kesehatan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam forum SKPD lintas sektor termasuk usulan musrenbang, usulan Dinas kesehatan yang meliputi usulan program dan kegiatan dari puskesmas dan pengelola program di Dinkes. Hal ini menjadi masukan dalam penyesuaian rancangan Renja SKPD dan penyusunan rancangan awal RKPD oleh Bappelitbangda yang selanjutnya menjadi acuan penetapan program dan kegiatan dalam menyusun Renja SKPD. Musrenbang kabupaten dilanjutkan dengan Musrenbang provinsi dan Musrenbang nasional. Dinas Kesehatan melakukan kajian informasi berbagai usulan tersebut. Usulan kegiatan yang diakomodir adalah kegiatan yang memiliki kesesuaian dan terkait dengan isu penting penyelenggaraan tupoksi dan kewenangan Dinas kesehatan.

Yang menjadi pertimbangan penentuan program, kegiatan maupun anggaran diantaranya adalah :

a. program/kegiatan yang lanjutan;
b. program/kegiatan yang menyokong kebijakan nasional dan provinsi;
c. program/kegiatan sesuai arahan rancangan awal RKPD; dan
d. program/kegiatan prioritas hasil analis kebutuhan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Periode tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. dimana penekanan pembangunan pada tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan fondasi transformasi.

Tujuan pembangunan jangka menengah nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan jangka panjang nasional yaitu dituangkan dalam upaya pencapaian Visi dan 8 Misi (agenda) jangka panjang pembangunan 2045, yakni :

Visi Indonesia Emas 2045

"NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

Dimana kesehatan dalam 8 Misi (Agenda) Pembangunan 2025-2045 yaitu: Transformasi Indonesia dengan Misi (Agenda) 1 : Transformasi Sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing. Selain pada 17 Arah (Tujuan) Pembangunan 2025–2045, maka kesehatan berada Transformasi Sosial yang meliputi (1) Kesehatan untuk semua (2) Pendidikan berkualitas yang merata dan (3) Perlindungan sosial yang adaptif.

Kesehatan untuk Semua ini berarti **untuk setiap penduduk** (setiap penduduk dapat hidup sehat pada seluruh siklus hidup, wilayah dan kelompok masyarakat) **pada semua layanan** (Setiap penduduk dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas) dan **oleh semua pemangku kepentingan** (pemerintah, NGO, pelaku usaha, masyarakat).

Tantangan Pembangunan Kesehatan

1. Transisi Epidemiologi, Ancaman Pandemi, dan Beban Ganda Gizi
    - Pergeseran beban penyakit (PTM meningkat, PM masih tinggi)
    - Penyakit tropis terabaikan, seperti malaria dan kusta masih ada di berbagai wilayah
    - Ancaman penyakit transnasional (pandemi) dan *emerging*
    - Tantangan pangan: ketidaktersediaan dan ketidakterjangkauan variasi pangan sehat, peran pangan olahan semakin besar, dan pola konsumsi tidak sehat

2. Transisi Demografi
    - Peningkatan penduduk lansia dapat menyebabkan penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif meningkat
    - Tingginya mobilitas penduduk memungkinan penyebarluasan penyakit menular
    - Urbanisasi memungkinan penyakit menular dan tidak menular meningkat

3. Pemerataan dan Desentralisasi
    - Status dan kapasitas sistem kesehatan belum merata
    - Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tidak merata

4. Globalisasi dan Perubahan Iklim
    - Perubahan iklim berpotensi meningkatkan risiko perkembangbiakan vektor penyakit dan dampak kesehatan akibat bencana alam.

5. Pembiayaan
    - Kebutuhan pembiayaan kesehatan terus meningkat
    - Pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat publik menuntut dukungan pembiayaan pemerintah yang kuat
    - Keterbatasan fiskal daerah
    - Perlu mobilisasi dan inovasi pembiayaan

6. Partisipasi Masyarakat

Peningkatan partisipasi masyarakat:

- pelembagaan kader kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar dan edukasi,
- pelibatan swasta dalam jaminan kesehatan dan industri pelayanan kesehatan dan farmasi, serta perluasan pelayanan kesehatan.

7. Teknologi

- Penguasaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan data dan informasi, dan penemuan kasus dan pengobatan penyakit.

Highlight Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan

a. Meningkatkan upaya kesehatan
   i. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat, perluasan upaya promotif dan preventif;
   ii. Pengendalian produksi, konsumsi, dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;
   iii. Jaminan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan;
   iv. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, lansia, mental, kerja, dan tradisional, pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular, serta penuntasan penyakit tropis terabaikan
   v. pengembangan kebijakan keluarga berencana secara komprehensif;
   vi. perluasan investasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif sampai dengan tingkat desa dan kelurahan termasuk kelembagaan kader kesehatan yang didukung komitmen politik, kepemimpinan, pembiayaan dan tata kelola, kolaborasi intersektoral, pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat termasuk swasta;
   vii. pemerataan pelayanan dan sarpras kesehatan mencakup promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif;
   viii. pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat; dan
   ix. pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan.
b. Mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif
   i. penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan;
   ii. pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan kesehatan; percepatan produksi dokter spesialis dan dokter subspesialis dengan RS sebagai penyelenggara utama pendidikan;
   iii. peningkatan secara signifikan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan;
   iv. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan;

v. penguatan riset, data dan informasi untuk mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti, serta pengembangan dan penerapan riset, teknologi dan inovasi bidang kesehatan;
vi. penataan sistem kesehatan nasional dan daerah termasuk tujuan dan subsistem di dalamnya, seperti kepemimpinan dan tata kelola; dan
vii. restrukturisasi urusan dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah di bidang kesehatan termasuk skema pembiayaan dan pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Highlight Kebijakan Kesehatan pada Agenda Lain

a. Transformasi Ekonomi
   i. Penguatan industri halal;
   ii. Pembangunan industri *medium-high technology* seperti industri farmasi;
   iii. Perwujudan kota layak huni, inklusif, berbudaya utamanya dengan membangun perumahan layak huni, air minum siap konsumsi, transportasi multimoda, pengelolaan sampah dan limbah, pendidikan dan kesehatan berbasis akses pada platform pembelajaran digital dan akses online pada pelayanan digital kesehatan terpadu, penyediaan energi berbasis energi baru dan terbarukan, serta mendorong penerapan budaya berkota yang disiplin dan sehat.
b. Kewilayahan Dan Sarana Prasarana
   i. Penyediaan sarana dan prasarana dasar air minum, sanitasi;
   ii. Pemenuhan konektivitas fisik khususnya simpul transportasi dan penghubung jalan;
   iii. Peningkatan kecukupan pasokan tenaga listrik secara berkelanjutan;
   iv. Reformulasi pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, daerah 3TP, potensi kawasan, dan kapasitas daerah yang berbeda-beda.
c. Ketahanan Sosbud Dan Ekologi
   i. Peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis berkelanjutan yang terintegrasi;
   ii. Peningkatan rekayasa lingkungan dan pengendalian penyakit hewan penular penyakit;

iii. Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman;
iv. Peningkatan asupan zat gizi mikro melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan skala luas;
v. Penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi terutama pada anak dalam periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK);
vi. Pencegahan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) terhadap penyakit yang dipengaruhi oleh iklim di sektor kesehatan.

d. Transformasi Tata Kelola
i. Harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

e. Stabilitas Dan Ketangguhan Diplomasi
i. Penggalian sumber-sumber penerimaan pajak baru (seperti *sin tax*, *carbon tax*) serta dari sumber bukan pajak.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

- Rerata Angka Kematian Ibu (AKI) global adalah 223 per 100.000 kelahiran hidup/KH (UNICEF, 2020). AKI Indonesia setara dengan beberapa negara Afrika dan India, serta menempati posisi ketiga tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja dan Myanmar. Target AKI dalam SDGs 2030 adalah 70 per 100.000 KH. Penyebab utama kematian ibu dapat dicegah, namun tata laksana dihadapkan pada isu sistem rujukan, kapasitas dan kualitas pelayanan, serta tenaga kesehatan.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Stunting dapat mempengaruhi tumbuh kembang baik secara fisiologis (pertumbuhan fisik) maupun secara kognitif (kemampuan berpikir). Tingkat prevalensi stunting di Indonesia menyentuh angka 21,6 persen pada tahun 2022, jauh tertinggal dibanding negara-negara maju dengan rata-rata stunting dibawah 5 persen.

3. Menurunkan angka insiden Tuberkulosis

   Indonesia menempati peringkat ke-2 negara dengan jumlah kasus TB tertinggi secara global dan pada tingkat populasi, insidensi TB Indonesia lebih besar daripada India yang menempati peringkat pertama jumlah kasus.

4. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

   Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

Tabel 3.1

Sasaran Pembangunan Kesehatan Untuk Semua Tahun 2025 dan 2045:

RPJPN 2025-2045		
Indikator Utama	**Target 2025**	**Target 2045**
1. Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	**80,0**
2. Kesehatan Ibu dan Anak		
a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	**16**
b. Prevalensi Stunting Balita (%)	13,5	**5,0**
3. Insidensi Tuberkulosis (%)	274	**76**
4. Cakupan Kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,0	**99,5**

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan

3.2.1 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 didasarkan pada Visi dan Misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, serta isu strategis aktual.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025, Visi dan Misi pada RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu :

VISI :

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

MISI :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

3.2.2 Tujuan

Pada dasarnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinginya dimana meningkatnya kemampuan masyarakat sehingga mampu mengenali permasalahan kesehatan dan mengatasi permasalahan kesehatan sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang sehat, mandiri dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan termasuk kesehatan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dimana Pasal 13 menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan Renja Dinas Kesehatan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berdasarkan visi misi dan tujuan pada RPD dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta 2024-2026 sesuai dengan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu :

Visi	:	"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"
Misi 2	:	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan 2	:	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dengan memperhatikan RPJPD, RPD dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 RPJMD tersebut maka tujuan yang dicapai oleh Dinas Kesehatan merupakan sasaran pada RPJMD yaitu: “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” dengan indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya angka harapan hidup menjadi 71,62 tahun pada tahun 2025 di Kabupaten Purwakarta.

3.2.3 Sasaran

Berdasarkan visi misi dan tujuan pada RPD dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta 2024-2026 sesuai dengan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu :

Visi	:	"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"
Misi 2	:	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan 2	:	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
Sasaran 3 (Pemerintah Kab Purwakarta)	:	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana
Sasaran Dinas Kesehatan	:	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Dengan memperhatikan RPJPD, RPD, dan Renstra tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan yaitu: Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan. Dimana sasaran Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Renja Dinas Kesehatan yaitu meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71,62 tahun pada tahun 2025 di Kabupaten Purwakarta.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, maka falsafah dan motto yang ingin dibangun adalah :

Dinas Kesehatan Tanginas

(Tangguh, Gesit, Inovatif, Adaptif dan Sigap)

Falsafah dan motto tersebut menggambarkan suasana kerja dan sumber daya manusia yang unggul (tangguh), selalu semangat (gesit), penuh inovasi (inovatif), menyesuaikan dengan tantangan dan perkembangan, tidak mudah menyerah (adaptif) dan cepat tanggap dan responsip (sigap), sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2024 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipasif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Tingkat Nasional. Rencana kerja yang dibuat mengacu pada RPD Kabupaten Purwakarta 2024 – 2026 serta sinkronisasi dari berbagai usulan dengan memperhatikan agenda pembangunan di pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta.

Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan ditetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimum dengan segala sumberdaya yang ada.

Pada tahun 2025 mengalami perubahan terkait nomenklatur program dan kegiatan serta adannya menu sub kegiatan pada nomenklatur kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Hal ini mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) serta KepMendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dilakukan perubahan dengan KepMendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan kembali dengan Kepmendagri Nomor 900.1.5.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas KepMendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, yaitu :

a. Pencapaian target nasional dan visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian SDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
d. Pencapaian NSPK dan SPM bidang kesehatan,
e. serta target dan upaya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana maupun operasional pelayanan kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 tertanggal 30 Maret 2023, maka terdapat perubahan yang sangat signifikan dari 7 (tujuh) indikator pada Renstra 2018-2023 menjadi 90 (sembilan puluh) indikator atau 78 (tujuh puluh delapan) hasil penggabungan (SPM dan LPPD) pada Renstra 2024-2026 dan Renja 2025, dengan rincian sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) indikator. Dan terdapat kesamaan indikator yaitu 12 indikator pada LPPD merupakan indikator SPM Bidang Kesehatan sehingga bila digabungkan/ disederhanakan menjadi 63 indikator.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebanyak 6 (enam) indikator.
c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebanyak 2 (dua) indikator.
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan sebanyak 6 (enam) indikator, dan
e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) indikator.

Adapun jumlah kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2

Pemetaan Program dan Indikator, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Bidang /Sekretariat Dinas Kesehatan Tahun 2025

KODE	PROGRAM	JUMLAH INDIKATOR		
		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.02.02	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesmas : 33 Indikator Bidang P2P : 33 Indikator Bidang Yankes : 9 Indikator Total : 75	4	44
1.02.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang SDK : 6	3	6
1.02.04	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Bidang SDK : 2	4	10
1.02.05	Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan	Bidang Kesmas : 6	3	4
		Total : 89		
1.02.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	SEKRETARIAT : 2	9	52
	TOTAL	91	22	110

Sedangkan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, tenaga dan anggaran yang tersedia disusun dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3 (Tabel T-C.33-Permendagri No 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**207.133.828.294**				**210.083.400.856**
1.02.01	**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Capaian SAKIP Perangkat Daerah**		**A**	**106.523.567.079**	**APBD Kab Purwakarta**		**A**	**108.231.163.570**
1.02.01.1.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	100	380.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	400.000.000
1.02.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	100	65.135.976.463	APBD Kab Purwakarta		100	67.239.846.610
1.02.01.1.03	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	100	305.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	342.500.000
1.02.01.1.05	Kegiatan :Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	100	360.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	370.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01.1.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	100	1.195.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	745.000.000
1.02.01.1.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purwakarta	100	1.500.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	1.500.000.000
1.02.01.1.08	Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purwakarta	100	3.538.168.000	APBD Kab Purwakarta		100	3.538.168.000
1.02.01.1.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Purwakarta	100	513.773.656	APBD Kab Purwakarta		100	500.000.000
1.02.01.1.10	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Kabupaten Purwakarta	100	33.595.648.960	APBD Kab Purwakarta		100	33.595.648.960
1.02.02	**Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk**		**0,15**	**86.109.252.055**	**APBD Kab Purwakarta**		**0,15**	**87.281.228.126**
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		45,45				54,55	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100				100	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		98,37				98,67	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		99,65				99,93	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		72,77				74,05	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		41,50				42,28	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		84,58				86,12	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		67,67				68,64	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		68,57				72,89	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		95,25				96,09	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		94,25				97,24	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		98,58				99,09	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan		86				96	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		deteksi dini HIV sesuai standar							
		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan		100				100	
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		98,37				98,67	
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		99,10				99,38	
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		72,77				74,05	
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		41,50				42,28	
		Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		68,57				72,89	
		Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		95,25				96,09	
		Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		94,25				97,24	
		Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus		98,58				99,09	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan							
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		86				96	
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		125				95	
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		12				9	
		Penurunan Incidence Rate Kasus TBC (per 100.000 penduduk)		125				95	
	-	Penurunan Angka Kematian Kasus TBC (per 100.000 penduduk)		12				9	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		4				4	
		Angka kelangsungan hidup bayi		0,44				0,44	
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		99,61				99,61	
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		105				100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		105				100	
		Rasio posyandu per satuan balita		12				12	
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,191				0,191	
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,011				0,010	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		98				98	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		98,2				98,4	
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		100				100	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100				100	
		Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		tidak ada data karena tidak ada sub kegiatan survei/ penelitian untuk mengukur tersebut				tidak ada data	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		100				100	
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		100				100	
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani		70				80	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		90				95	
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		246				209	
		Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		3				2	
		Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		90				95	
		Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		90				90	
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100				100	
		Penderita diare yang ditangani		85				90	
		Angka kejadian Malaria		0				0	
		Tingkat kematian akibat malaria		0				0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		100				100	
		Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		100				100	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		< 0,015				< 0,014	
		Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir		100				4;4	
		Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS		70				80	
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		100				100	
		Cakupan kunjungan bayi		100				100	
		Cakupan puskesmas		118				118	
		Cakupan pembantu puskesmas		26				26	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		100				100	
		Cakupan pelayanan nifas		100				100	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		76,1				76,3	
		Cakupan pelayanan anak balita		71,3				71,5	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		100				100	
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat		100				100	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100				100	
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		100				100	
		Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		0				0	
		Persentase desa/kelurahan dengan stop buang air besar sembarangan		91				92	
		Persentase sarana air minum yang diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar		60				60.5	
		Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar		21				22	
		Persentase tempat tempat dan fasilitas umum(TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar		62				63	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02.2.01.	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	100	15.737.118.303	APBD Kab Purwakarta		100	15.737.118.303
1.02.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	100	69.962.133.752	APBD Kab Purwakarta		100	71.099.109.823
1.02.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kabupaten Purwakarta	100	210.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	245.000.000
1.02.02.2.04	Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	100	200.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	200.000.000
1.02.03	**Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan**		**30**	**13.201.009.160**	**APBD Kab Purwakarta**		**30**	**13.201.009.160**
		Persentase Ijin Praktik Tenaga Kesehatan yang diterbitkan		30				30	
		Persentase kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar		30				30	
		Persentase distribusi tenaga kesehatan sesuai standar kebutuhan		30				30	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rasio dokter per satuan penduduk		30				30	
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk		30				30	
1.02.03.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	100	100.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	100.000.000
1.02.03.2.02	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Purwakarta	100	12.901.009.160	APBD Kab Purwakarta		100	12.901.009.160
1.02.03.2.03	Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Kabupaten Purwakarta	100	200.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	200.000.000
1.02.04	**Program : Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**Persentase Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan**		**100**	**620.000.000**	**APBD Kab Purwakarta**		**100**	**685.000.000**
		Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina		80				82	
1.02.04.2.01	Kegiatan : Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)	Kabupaten Purwakarta	100	115.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	130.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.04.2.02	Kegiatan : Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	100	420.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	450.000.000
1.02.04.2.03	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kabupaten Purwakarta	100		APBD Kab Purwakarta		100	**0**
1.02.04.2.04	Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kabupaten Purwakarta	100	50.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	60.000.000
1.02.04.2.05	Kegiatan : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kabupaten Purwakarta	100	35.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	45000000
1.02.04.2.06	Kegiatan :Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi	Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Kabupaten Purwakarta	100		APBD Kab Purwakarta		100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							
1.02.05	**Program : Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Kesehatan**	**Tingkat pembinaan/sosialisasi masyarakat diKepala Bidang kesehatan**		**6**	**680.000.000**	**APBD Kab Purwakarta**		**8**	**685.000.000**
		Persentase pembinaan kader/lembaga kesehatan masyarakat yang dibina		89				96	
		Jumlah penerapan kebijakan Germas		4				4	
		Persentase posyandu aktif		85				90	
		Jumlah pedoman/regulasi/rekomendasi kebijakan penerapan Germas		15				18	
		Persentase melaksanakan pembinaan posyandu aktif		50				60	
1.02.05.2.01	Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	100	45.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	50.000.000
1.02.05.2.02	Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Kabupaten Purwakarta	100	615.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	610.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Hasil)/ Kegiatan (Output/ Keluaran)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
1.02.05.2.03	Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Purwakarta	100	20.000.000	APBD Kab Purwakarta		100	25.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN

4.1 Rencana Kerja

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, maka seluruh program dan kegiatan pada tahun 2024 diarahkan untuk mewujudkan pencapaian hal tersebut.

Penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sudah sesuai dan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta, program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar bidang urusan pemerintahan. Dimana program Dinas Kesehatan pada SIPD terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Secara detail mengenai uraian rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan digambarkan pada kerangka Pendanaan dan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disajikan dalam bentuk matriks (tabel dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah), terlampir.

Berdasarkan sumber anggaran, pendanaan Dinas Kesehatan meliputi :

- ✓ Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- ✓ DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayana n Kesehatan Dasar
- ✓ DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
- ✓ DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
- ✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan
- ✓ Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
- ✓ DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
- ✓ Pendapatan dari BLUD (khusus UPTD Puskesmas dan Labkes yang menerapkan BLUD)

BAB V
PENUTUP

Dengan Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja atau disingkat Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dapat terselesaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2025 merupakan amanat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja Dinas Kesehatan disusun dan ditetapkan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta selama tahun 2025 dalam menghadapi tantangan pembangunan kesehatan yang semakin kompleks, multifaktor, berlangsung cepat, pesat, dan tidak menentu.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2024-2026. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan lampiran 2 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dengan demikian diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan selama satu tahun ke depan. Untuk itu dalam melaksanakan rencana kerja Dinas kesehatan tahun 2025, perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Dinas kesehatan merupakan tahap pertama (P1) dalam pencapaian program kesehatan sehingga harus diikuti dengan tahap kedua berupa penggerakan pelaksanaan (P2) yang konsisten dan akuntabel serta didukung oleh pengawasan, pengendalian dan penilaian (P3) yang efektif dan optimal.

2. Besaran anggaran dalam Renja ini tidak bersifat mutlak karena masih mungkin berubah sesuai dengan perkembangan dan penetapan anggaran termasuk kemungkinan adanya anggaran perubahan .
3. Dalam pelaksanaan kegiatan maka setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen harus melaporkan hasil kegiatannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan baik laporan keuangan maupun pencapaian fisik kegiataannya.
4. Pada akhir kegiatan maka setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen harus melaporkan hasil akhir kegiatannya dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan.
5. Untuk mencapai hasil yang optimal sehinga tepat anggaran dan tetap sasaran maka peran serta lintas program dan lintas sektor baik masyarakat, swasta, LSM maupun stakeholder lainnya harus menjadi prioritas utama dan pertama karena kesehatan adalah hak asasi, investasi dan milik bersama serta kegiatan yang kompleks dan multifaktor sehingga dukungan tersebut menjadi sangat mutlak dan memudahkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Renja Dinas Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan. Dengan demikian upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan dapat lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini, Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Agar Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, perlu dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur kesehatan di

lingkungan Dinas Kesehatan. Dengan penerapan nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan, diharapkan dapat memacu semangat aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Renja tahun 2025 ini.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,

dr. H. Deni Darmawan, MARS
Pembina Tingkat I
NIP 197509132006041008

L A M P I R A N

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KESEHATANKAB. PURWAKARTA

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Dinas Kesehatan				192.570.654.466,00				192.570.654.466,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				192.570.654.466,00				192.570.654.466,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				192.570.654.466,00				192.570.654.466,00
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	108.691.163.570,00			-	108.691.163.570,00
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	4 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	200.000.000,00
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	2 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	30.000.000,00
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	30.000.000,00
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	2 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	30.000.000,00
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	30.000.000,00
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	40.000.000,00
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Laporan	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	40.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		100 Persen	67.239.846.610,00			100Persen	67.239.846.610,00
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	846 Orang/bulan	67.007.346.610,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		984 Orang/bulan	67.007.346.610,00
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	22.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	22.500.000,00
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	32.500.000,00
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	32.500.000,00
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	32.500.000,00
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	37.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	37.500.000,00
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	37.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	37.500.000,00
	1	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	37.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	37.500.000,00
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		100 Persen	232.500.000,00			100Persen	232.500.000,00
	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	37.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	37.500.000,00
	1	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55.000.000,00
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Laporan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	30.000.000,00
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Laporan	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	55.000.000,00
	1	02	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD								
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	55.000.000,00
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	380.000.000,00			100Persen	380.000.000,00
	1	02	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	7 Unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	60.000.000,00
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	50.000.000,00
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	40.000.000,00
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	30.000.000,00
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50.000.000,00
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	77 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	50.000.000,00
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	53 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	50.000.000,00
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	21 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	50.000.000,00
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	1.195.000.000,00			100Persen	1.195.000.000,00
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Paket	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	45.000.000,00
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Paket	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	200.000.000,00
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	50.000.000,00
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Paket	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	100.000.000,00
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Paket	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	100.000.000,00
	1	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material								
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Paket	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Paket	50.000.000,00
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	50.000.000,00
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Laporan	500.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	500.000.000,00
	1	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50.000.000,00
	1	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	50.000.000,00
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	1.550.000.000,00			100Persen	1.550.000.000,00
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Unit	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	200.000.000,00
	1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Unit	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	1.000.000.000,00
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	100.000.000,00
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Unit	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	250.000.000,00
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		100 Persen	3.538.168.000,00			100Persen	3.538.168.000,00
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Laporan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	50.000.000,00
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Laporan	1.100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	1.100.000.000,00
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Laporan	2.388.168.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	2.388.168.000,00
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	560.000.000,00			100Persen	560.000.000,00
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Unit	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70 Unit	150.000.000,00
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	60.000.000,00
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Unit	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	250.000.000,00
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan		100 Persen	33.595.648.960,00			100Persen	33.595.648.960,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Unit Kerja	33.595.648.960,00	PENDAPATAN DARI BLUD		21 Unit Kerja	33.595.648.960,00
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		-	69.648.481.736,00			-	69.648.481.736,00
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 Persen	3.287.926.544,00			100Persen	3.287.926.544,00
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas								
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Unit	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas								
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	100.000.000,00
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-		20 Unit	100.000.000,00
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi								
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		20 Unit	100.000.000,00
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2.020.426.544,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Paket	2.020.426.544,00
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000 Keluarga	67.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			67.500.000,00
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	50.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		1 Paket	50.000.000,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		100 Persen	65.910.555.192,00			100Persen	65.910.555.192,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	17747 Orang	333.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK		19462 Orang	333.000.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	16941 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.800 Orang	50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	16151 Orang	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK		18.012 Orang	100.000.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	7815 Orang	168.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK			168.000.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	143607 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52.162 Orang	50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	621532 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK		529.111 Orang	50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	108372 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK		11.594 Orang	50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi								
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	70532 Orang	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		162.184 Orang	70.000.000,00
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus								
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	13202 Orang	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK		11.962 Orang	70.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat								
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1352 Orang	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-		1.345 Orang	70.000.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis								
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	22799 Orang	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK		10.337 Orang	100.000.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	24512 Orang	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK		20.331 Orang	150.000.000,00
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	15.000.000,00
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.227.378.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.227.378.850,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK			75.000.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK			50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK			70.000.000,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK			50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK			100.000.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)								
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70.000.000,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Orang	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			300.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK			100.000.000,00
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	42.006.112.710,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN			42.006.112.710,00
	1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah								
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	58.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58.000.000,00
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.000,00
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	14.673.063.632,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK			14.673.063.632,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	800.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			800.000.000,00
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	45 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-			55.000.000,00
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)								
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34 Unit	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.000.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis								
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	4691 Orang	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	982 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria								
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	576 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK			5.000.000,00
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok								
							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	0 Tatanan	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00
	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota								
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan								
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	55.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara		100 Persen	250.000.000,00			100Persen	250.000.000,00
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	250.000.000,00
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah		100 Persen	200.000.000,00			100Persen	200.000.000,00
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya								
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	50.000.000,00
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55 Unit	50.000.000,00
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-		55 Unit	50.000.000,00
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	50.000.000,00
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-		-	13.301.009.160,00			-	13.301.009.160,00
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Ijin Praktek Tenaga Kesehatan di		100 Persen	100.000.000,00			100Persen	100.000.000,00
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2100 Dokumen	50.000.000,00
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		320 Dokumen	50.000.000,00
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di		100 Persen	13.001.009.160,00			100Persen	13.001.009.160,00
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Dokumen	50.000.000,00
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	438 Orang	12.901.009.160,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		624 Orang	12.901.009.160,00
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK		22 Dokumen	50.000.000,00
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat		100 Persen	200.000.000,00			100Persen	200.000.000,00
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295 Orang	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-		30 Orang	200.000.000,00
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-		-	245.000.000,00			-	245.000.000,00
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Izin Apotik Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tadisional (UMOT)		100 Persen	60.000.000,00			100Persen	60.000.000,00
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		7 Dokumen	60.000.000,00
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga Kelas 1		100 Persen	45.000.000,00			100Persen	45.000.000,00
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-BOKKB-BOK		250 Dokumen	45.000.000,00
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang		100 Persen	45.000.000,00			100Persen	45.000.000,00
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250 Dokumen	45.000.000,00
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran		100 Persen	60.000.000,00			100Persen	60.000.000,00
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah								
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	60.000.000,00
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra		100 Persen	35.000.000,00			100Persen	35.000.000,00
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	35.000.000,00
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		-	685.000.000,00			-	685.000.000,00
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat		100 Persen	50.000.000,00			100Persen	50.000.000,00
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan,	3 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	50.000.000,00
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah		100 Persen	610.000.000,00			100Persen	610.000.000,00
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	560.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	560.000.000,00
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7228 Keluarga	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		183000 Keluarga	50.000.000,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat		100 Persen	25.000.000,00			100Persen	25.000.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Kab. Purwakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	25.000.000,00
								J U M L A H		**192.570.654.466,00**				**192.570.654.466,00**